



**KINERJA PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**TESIS**

Oleh

**Inayatur Robbaniyah, S.I.P**

**NIM 170820201008**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**KINERJA PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN KESEHATAN DI KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk  
menyelesaikan Program Magister Ilmu Ekonomi (S2)  
dan memperoleh gelar Magister Sains

Oleh

**Inayatur Robbaniyah, S.I.P**

**NIM 170820201008**

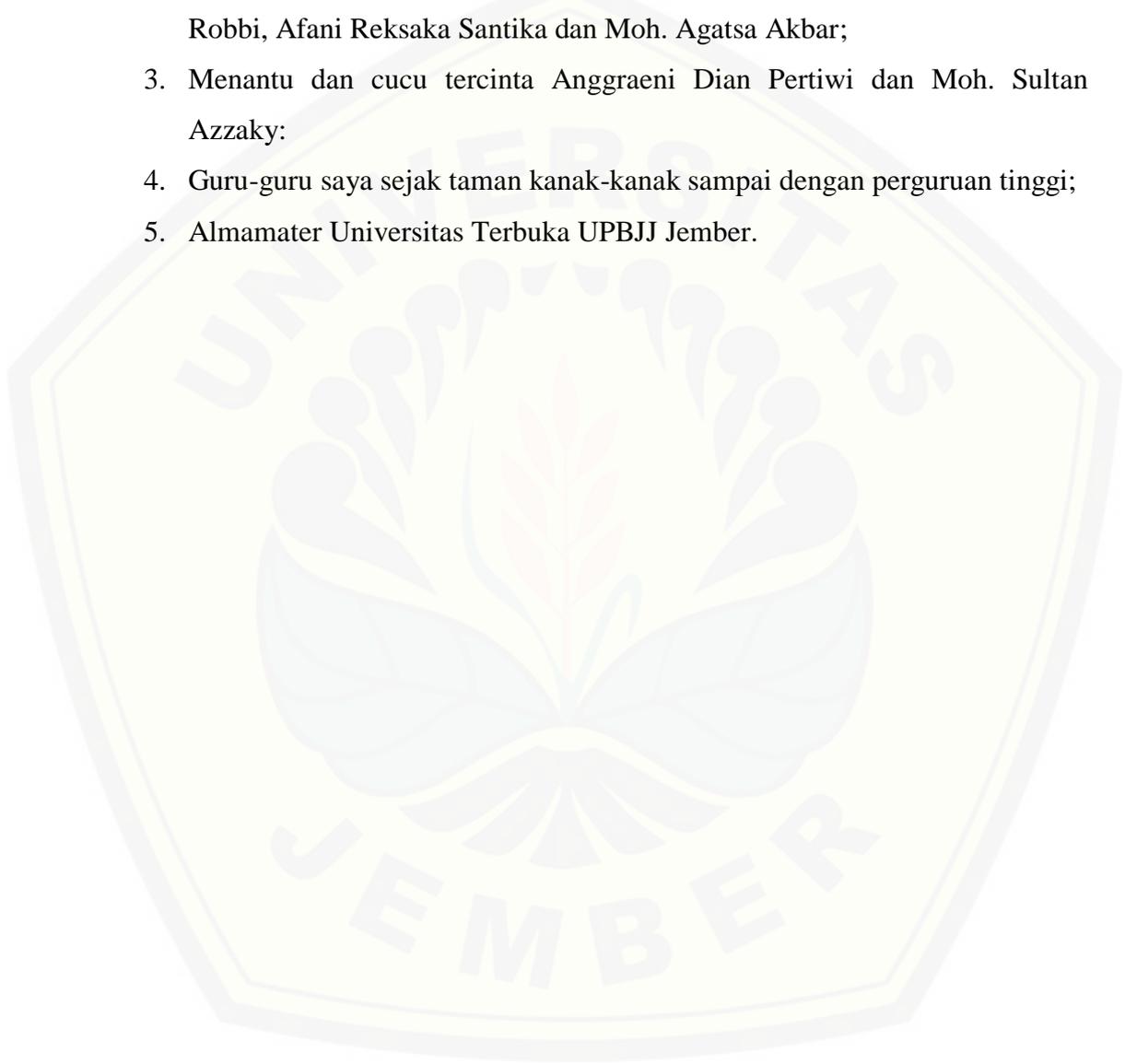
**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hindun dan Ayahanda H. Moh. Hadir;
2. Suamiku Tercinta Moh. Ansori beserta ketiga anakku Tersayang Fadli Robbi, Afani Reksaka Santika dan Moh. Agatsa Akbar;
3. Menantu dan cucu tercinta Anggraeni Dian Pertiwi dan Moh. Sultan Azzaky;
4. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
5. Almamater Universitas Terbuka UPBJJ Jember.



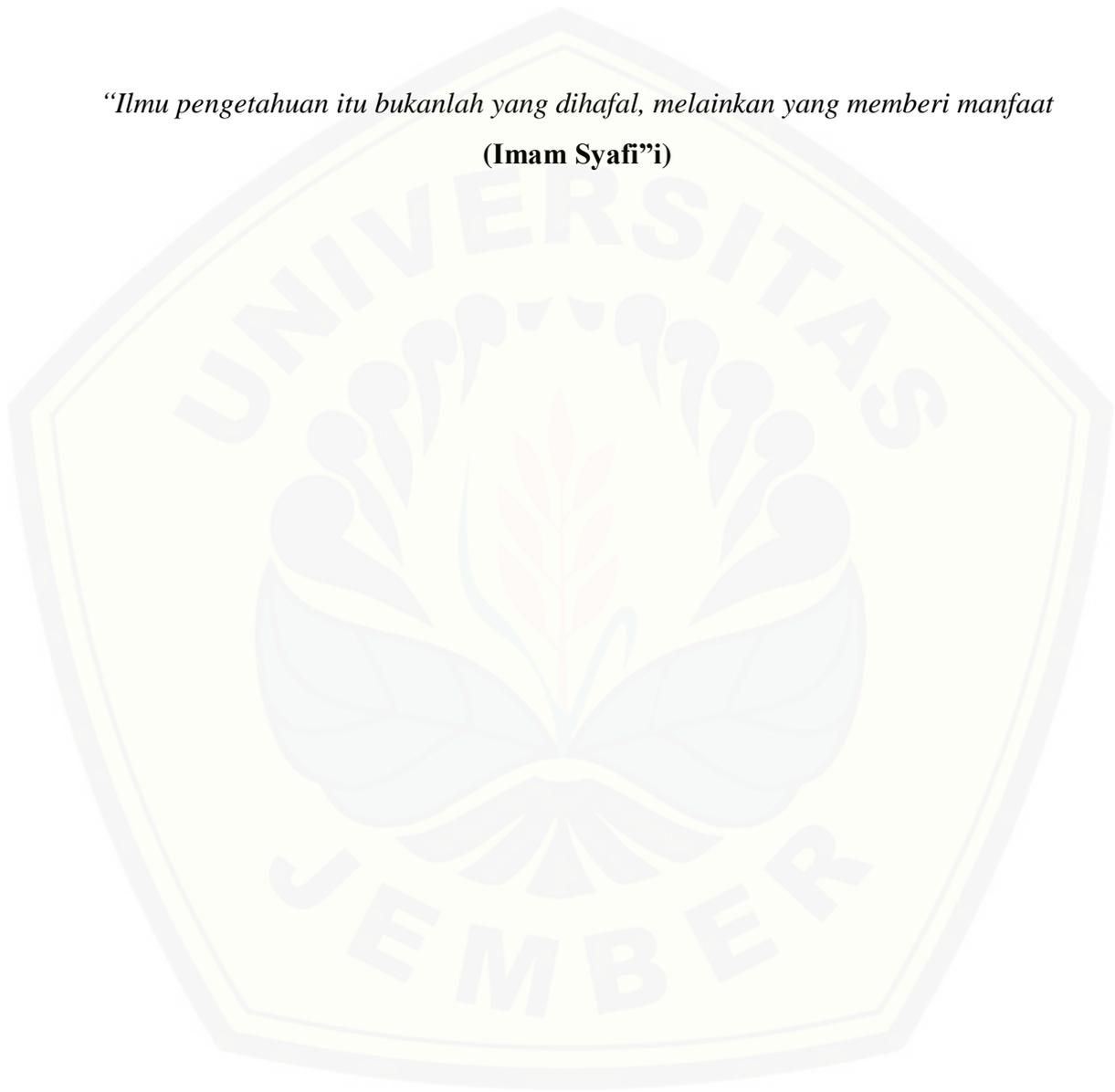
**MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman”*

**(Terjemahan QS. surat Al - Anfal : 19)**

*“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat*

**(Imam Syafi’i)**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**SURAT PERNYATAAN**

Nama : Inayatur Robbaniyah, S.I.P.  
NIM : 170820201008  
Jurusan : Magister Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi Regional  
Judul : Kinerja Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa tesis yang sudah saya selesaikan adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan dari pihak lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 September 2020

Yang menyatakan,



Inayatur Robbaniyah, S.I.P.

NIM 170820201008

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Kinerja Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi : Pendekatan Analisis Matrik Logframe dan Analisis SWOT” telah disetujui dan diuji pada:

Hari/Tanggal : 2 September 2020

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P.

NIP. 19720713 199903 1 001

Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E

NIP. 19780414 200112 2 003

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Universitas Jember

Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si

NIP. 19710610 200112 2 002

**PENGESAHAN**

“Kinerja Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi : Pendekatan Analisis Matrik Logframe dan Analisis SWOT” karya Inayatur Robbaniyah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 2 September 2020

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tim Penguji;  
Ketua,



Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si.  
NIP. 19600412 198702 1 001

Anggota I,



Dr. Moh. Adenan, M.M.  
NIP. 19661031 199203 1 001

Anggota III,

Anggota II,

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.  
NIP. 19780414 200112 2 003

Anggota IV,

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.  
NIP. 19720713 199903 1 001

Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E.  
NIP. 19780414 200112 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA  
NIP 19710727 199512 1 001

**Kinerja Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi**

**Inayatur Robbaniyah, S.I.P.**

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Jember*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis kinerja pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi; untuk menganalisis kondisi *exciting* pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dan untuk menganalisis strategi strategi kinerja anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait, meliputi Badan Pusat Statistik Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Bappeda dan instansi-instansi terkait lain. Metode analisis data menggunakan matriks logframe dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan hal - hal berikut 1) kinerja pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan di Kabupaten Banyuwangi mengalami didasarkan pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan telah melebihi target yang ditetapkan.; 2) Kondisi *Exciting* Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dengan adanya perubahan dalam desain logframe pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan rancangan pengeluaran pemerintah yang berdasarkan program kerja pada sektor pendidikan dan kesehatan; 3) strategi pemerintah antara lain upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Key word: kinerja, pengeluaran pemerintah, sektor, pendidikan, kesehatan, logframe dan SWOT

**Performance of Government Expenditure in the Education and Health Sector in  
Banyuwangi District**

**Inayatur Robbaniyah, S.I.P.**

*Master of Economics, Faculty of Economics and Business,  
University of Jember*

**ABSTRACT**

*The objectives of study were to analyze the performance of government spending in the education and health sector in Banyuwangi Regency; to analyze the exciting conditions of government spending in the education and health sector in Banyuwangi Regency and to analyze the strategy of the performance budget of the government spending on education and health sector in Banyuwangi Regency. This type of research uses descriptive research. Secondary data used in this study came from relevant agencies, including the Provincial and Regency / City Statistics Agency, the Office of Education, Bapeda and other relevant agencies. Data analysis method uses logframe matrix and SWOT analysis. Based on the results of data analysis, it can be concluded the following things: 1) the performance of government spending in the education sector and the health sector in Banyuwangi has experienced based on the achievement of education and health indicators that have exceeded the target set; 2) Exciting Conditions of Government Expenditure in the Education and Health Sector in Banyuwangi Regency are explained by changes in the design of the Banyuwangi Regency government logframe with the design of government spending based on work programs in the education and health sector; 3) government strategies include efforts to mobilize local revenue sources that arise as a result of increased economic activity as well as from various investment programs that have been implemented to improve the education and health sectors.*

*Key word: performance, government spending, sector, education, health, logframe and SWOT*

## RINGKASAN

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan Kabupaten Banyuwangi. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi.

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menganalisis kinerja pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi; untuk menganalisis kondisi *exciting* pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dan untuk menganalisis strategi strategi kinerja anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait, meliputi Badan Pusat Statistik Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Bapeda dan instansi-instansi terkait lain. Metode analisis data menggunakan matriks logframe dan analisis SWOT.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan hal - hal berikut 1) kinerja pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan di Kabupaten Banyuwangi mengalami didasarkan pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan telah melebihi target yang ditetapkan.; 2) Kondisi *Exciting* Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan dengan adanya perubahan dalam desain logframe pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan rancangan pengeluaran pemerintah yang berdasarkan program kerja pada sektor pendidikan dan kesehatan; 3) strategi pemerintah antara lain upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

## SUMMARY

*Government spending on education and health is basically an investment in economic growth. Regional budget allocation should be prioritized to improve the quality of public services more efficiently and effectively and responsively to the needs of Banyuwangi Regency. Government spending is a type of policy that can be carried out by the government as a step towards the welfare of its people and towards economic growth.*

*The objectives of study were to analyze the performance of government spending in the education and health sector in Banyuwangi Regency; to analyze the exciting conditions of government spending in the education and health sector in Banyuwangi Regency and to analyze the strategy of the performance budget of the government spending on education and health sector in Banyuwangi Regency.*

*This type of research uses descriptive research. Secondary data used in this study came from relevant agencies, including the Provincial and Regency / City Statistics Agency, the Office of Education, Bappeda and other relevant agencies. Data analysis method uses logframe matrix and SWOT analysis.*

*Based on the results of data analysis, it can be concluded the following things: 1) the performance of government spending in the education sector and the health sector in Banyuwangi has experienced based on the achievement of education and health indicators that have exceeded the target set; 2) Exciting Conditions of Government Expenditure in the Education and Health Sector in Banyuwangi Regency are explained by changes in the design of the Banyuwangi Regency government logframe with the design of government spending based on work programs in the education and health sector; 3) government strategies include efforts to mobilize local revenue sources that arise as a result of increased economic activity as well as from various investment programs that have been implemented to improve the education and health sectors.*

## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, karunia dan ridho-NYA penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “Kinerja Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi : Pendekatan Analisis Matrik Logframe dan Analisis SWOT”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Sains (S2) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak luput dari sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sudah meluangkan waktu untuk selalu membantu dalam penyusunan tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E.,M.P selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan dukungan yang tidak pernah bosan selama penulis menyelesaikan tesis
2. Ibu Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
3. Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Ibu Dr. Siti Komariyah, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi.
6. Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si., Dr. Moh. Adenan, M.M., Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E., Sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan tesis ini.
7. Segenap Pimpinan Kantor BPS Kabupaten Banyuwangi beserta kasi dan staf jajarannya yang telah memberikan ijin, dukungan, dan motivasi hingga terselesainya kuliah ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang selama ini turut membantu dalam masa studi sampai dengan menyelesaikan tugas akhir..
9. Semua teman Pascasarjana Ilmu Ekonomi angkatan 2017; Eny, Pak Wahyu, Pak Yunus, Mas Anis, Mas Ratri, Mas Angga, Mas Vrega, Badara, Dien, Irin, Rizka, Desi, Kiki, Dila, dan Nopita yang telah sabar membantu dan memotivasi sehingga kuliah ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jember, 2 September 2020



Inayatur Robbaniyah, S.I.P.

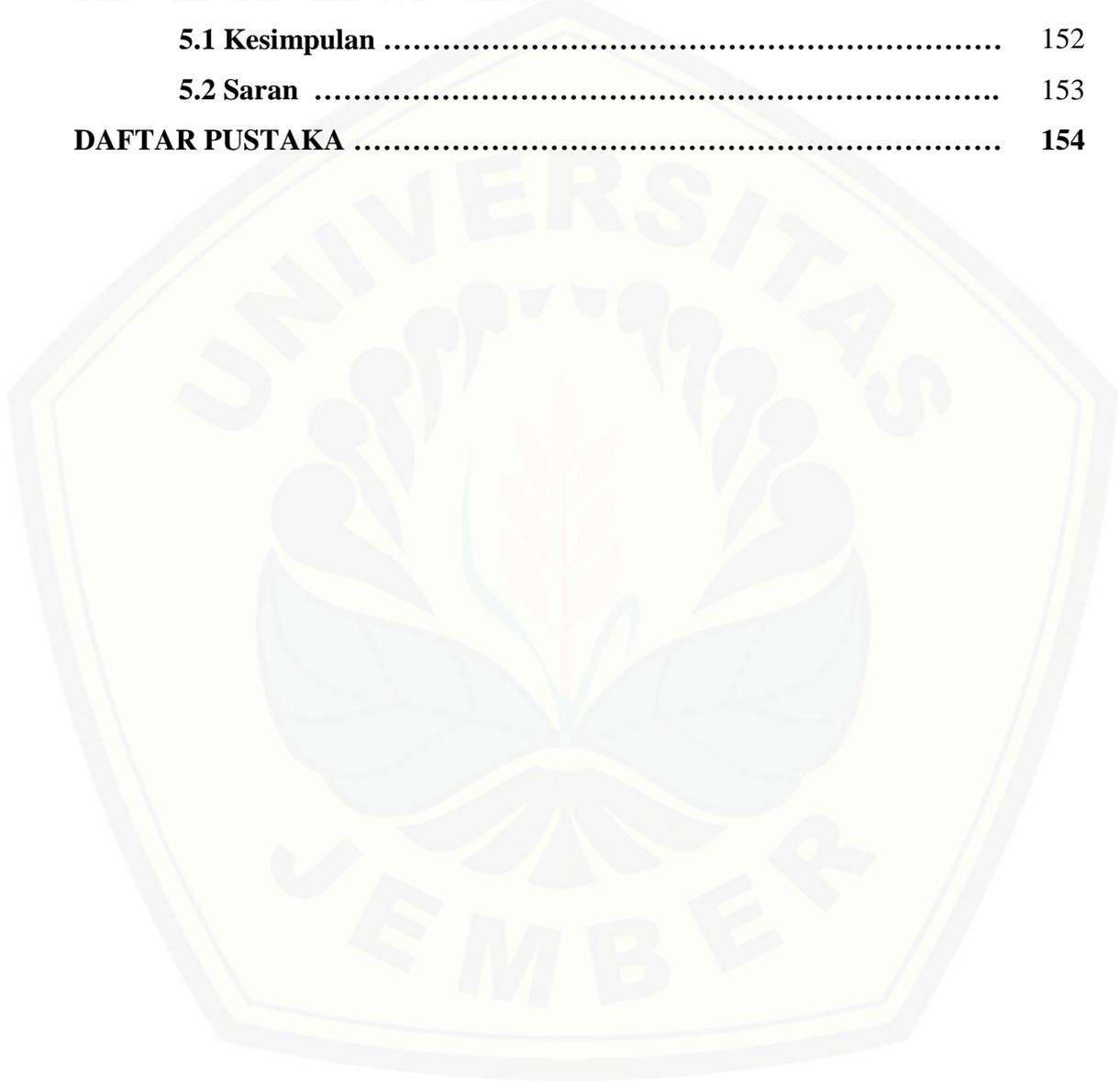
NIM 170820201008

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>x</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>20</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>20</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	<b>22</b>
2.1.1 Keuangan Daerah .....	22
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	23
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	29
2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan .....	31
2.1.5 Teori <i>Human capital</i> .....	33
<b>2.2 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>37</b>
<b>2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian</b> .....	<b>41</b>

<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Tahapan Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>3.4 Teknik Pengambilan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>43</b>
3.5.1 Analisis <i>Matrik Logframe</i> .....	44
3.5.2 Analisis SWOT .....	49
<b>3.6 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten</b>	
<b>Banyuwangi .....</b>	<b>53</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten	
Banyuwangi.....	53
4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi .....	59
4.1.3 Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuwangi .....	62
4.1.4 Kondisi Hasil Pembangunan Sektor Pendidikan dan	
Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi .....	65
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>78</b>
4.2.1 Kondisi Faktual ( <i>Eksisting</i> ) Pengeluaran Pemerintah	
di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan di Kabupaten	
Banyuwangi.....	78
4.2.2 Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	
dan Sektor Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.....	106
4.2.3 Strategi kinerja pengeluaran pemerintah sektor	
pendidikan dan sektor Kesehatan di Kabupaten	
Banyuwangi.....	119
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>132</b>
4.3.1 Kondisi Faktual ( <i>Eksisting</i> ) Pengeluaran Pemerintah di	
Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten	
Banyuwangi .....	132
4.3.2 Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan	

Sektor Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi .....	138
<b>4.3.3 Strategi Peningkatan Kinerja Anggaran Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi .....</b>	<b>146</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>152</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>152</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>153</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>



DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Efektitas Anggaran Sektor Pendidikan Kabupaten banyuwangi .....	6
1.2 Realiasi Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	7
1.3 Tingkat Efisiensi Anggaran Sektor Pendidikan Tahun 2018.....	9
1.4 Capaian APK, APS dan APM Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.....	10
1.5 Efektifitas Anggaran Sektor Kesehatan Kabupaten Banyuwangi .....	13
1.6 Realisasi Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan .....	14
1.7 Capaian Indikator dan Anggaran Sektor Kesehatan Tahun 2018....	16
1.8 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018 .....	18
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	38
3.1 Matriks Logframe .....	44
3.2 Pembobotan SWOT .....	50
3.3 Matrik SWOT .....	51
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Mata Pencaharian .....	57
4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 -2018 (%) .....	60
4.3 Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 .....	68
4.4 Rata-rata lama Sekolah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur .....	72
4.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018 .....	76
4.6 Matrik Logframe .....	82
4.7 Visi dan Misi Sektor Pendidikan dan Kesehatan .....	84
4.8 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	95
4.9 Realisasi Indeks Pendidikan dan Presentase PAUD Formal Ber-akreditasi Tahun 2013-2018 .....	99
4.10 Capaian Indikator Sektor Pendidikan 2013-2018 .....	101
4.11 Capaian Kinerja Sektor Pendidikan Tahun 2018 .....	108

4.12 Capaian Kinerja Anggaran Sektor Pendidikan Berdasarkan Program Pendidikan .....	110
4.13 Program dan kegiatan urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .....	111
4.14 Capaian Kinerja Sektor Kesehatan Tahun 2018 .....	115
4.15 Capaian Kinerja Anggaran Sektor Kesehatan .....	116
4.16 Penentuan Nilai Bobot Untuk IFAS ( <i>Internal Strategic Analysis Summary</i> ) .....	121
4.17 Hasil IFAS ( <i>Internal Strategic Analysis Summary</i> ) .....	123
4.18 Penentuan Nilai Bobot Untuk EFAS ( <i>Eksternal Strategic Analysis Summary</i> ) .....	125
4.19 Hasil EFAS ( <i>Eksternal Strategic Analysis Summary</i> ) .....	126
4.20 Strategi Pengeluaran Daerah Untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan .....	130
4.21 Perbedaan Matrik Logframe .....	137
4.22 Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor .....	141
4.23 Capaian Kinerja Sektor Pendidikan Tahun 2018 .....	143
4.24 Capaian Kinerja Sektor Kesehatan Tahun 2018 .....	145
4.25 Strategi Peningkatan Kinerja Pengeluaran .....	150

DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2018 .....	5
1.2 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2018 .....	12
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	41
4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi .....	54
4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2010-2018.....	55
4.3 Jumlah Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi .....	56
4.4 Perkembangan APK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2018 .....	58
4.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2018 .....	61
4.6 Tingkat PDRB per Kapita Kabupaten Banyuwangi .....	62
4.7 Komposisi Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2018 ....	63
4.8 Komposisi PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2018 .....	64
4.9 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi dan Propinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018 .....	66
4.10 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018 .....	70
4.11 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2018 .....	75
4.12 <i>Causal Loop</i> (kertas Kerja) Kabupaten Banyuwangi .....	79
4.13 Perencanaan .....	80
4.14 Desain <i>Logical Framework</i> .....	81
4.15 <i>Logframe</i> Perencanaan Terintegratif Misi .....	85
4.16 <i>Logframe</i> Tujuan 1 .....	86
4.17 <i>Logical Framework</i> Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .....	90
4.18 Hasil <i>Logical Framework</i> Dinas Pendidikan Misi-1 .....	92
4.19 Hasil <i>Logical Framework</i> Dinas Pendidikan Misi-3 .....	93
4.20 Pohon Kinerja Dinas Pendidikan .....	98

4.21 <i>Logframe</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi .....	103
4.22 Analisis <i>Logframe</i> Dinas Kesehatan Pencapaian Misi... ..	104
4.23 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan .....	105
4.24 Hasil IE Matriks .....	128



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuisisioner SWOT

Lampiran 2 Rekapitulasi Input SWOT

Lampiran 3 Foto Dokumentasi Penelitian



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan yang mencakup berbagai perubahan mendasarkan status sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan program pengentasan kemiskinan. Dimana pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar (Pendidikan dan kesehatan) dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2011).

Negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia menggunakan acuan dalam perumusan tujuan strategi dan program pembangunan yang tertuang dalam *Sustainability Development Goals (SDGs)*. *Sustainable Development Goals* yang secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan (UNDP, 2011).

Suatu keberhasilan untuk pencapaian SDGs itu tergantung dari bagaimana pemerintah dapat mengelola dengan baik, seperti kemitraan produktif segenap komponen masyarakat, penerapan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh daerah. (Kuncoro dan Mudrajat, 2013). Pemberian anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan konsumsi riil perkapita serta dapat mempermudah akses masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari (Delavallade dan Clara, 2006). Oleh karena itu maka pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan pembangunan dengan mencapai kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah diharapkan dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat agar tercipta masyarakat adil dan makmur. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang optimal, pemerintah menetapkan kebijakan otonomi desentralisasi yang bertujuan agar pembangunan ekonomi wilayah berkembang secara mandiri (Nurikhsan dan Diky, 2007). Kebijakan otonomi tersebut tertera dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 dan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisikan mengenai kebijakan pemerintah pusat memberi kewenangan dalam mengatur maupun mengurus pemerintahan terhadap pemerintahan daerah melalui desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Selanjutnya, dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berisi mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang pemerintah daerah untuk mengatur pendanaan dan keuangan daerah. Pendanaan dan keuangan daerah dapat dioptimalkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat guna dan berdaya guna. Munir, Badrul, (2002) dan Yasa, Mahendra, (2014) yang sejalan memberikan preposisi bahwa kunci keberhasilan sistem desentralisasi fiskal dimana kebijakan pembangunan daerah ditekankan pada kondisi kebutuhan serta kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada. Selain itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki andil besar di dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan publik dan peningkatan pelayanan masyarakat (Astri dkk. 2013) dan Nurikhsan, Diky (2007).

Selaras dengan tujuan ekonomi daerah, desentralisasi fiskal tidak dapat jauh dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Adanya kebijakan

fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Namun ketersediaan dalam hal pendanaan daerah selalu mempunyai kendala karena pada dasarnya anggaran selalu terbatas.

Sasaran kebijakan fiskal harus menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah dari pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang atau wilayah berhak untuk menikmati pembangunan secara terintegral. Instrument kebijakan fiskal melalui pengalokasian anggaran juga ditujukan kepada sektor prioritas, karena dengan mengalokasikan kepada sektor prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dasar antara lain pendidikan dan kesehatan, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2003).

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional negara Indonesia adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang (Jhingan M.L, 2003). Pemerintah memiliki fungsi dalam hal alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif pemerintah harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi (Dumairy, 1999).

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal,

mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi.

Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja (Notoatmodjo dan Soekidjo, 2009). Menurut Mankiw, (2006) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Kondisi tingkat pendidikan di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada indikator angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan kondisi peningkatan mulai tahun 2010 - 2018. HLS Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 12,81 tahun dan RLS sebesar 7,18 tahun seperti Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2018



Sumber: BPS Banyuwangi, Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat pada Tahun 2017 Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected Years of Schooling* (EYS) berada pada angka 12,68, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years of Schooling* (MYS) berada pada angka 7,11. Pada tahun 2018 EYS berada pada angka 12,81 sedangkan . MYS berada pada angka 7,18. Hal ini disebabkan angka partisipasi sekolah di tingkat SLTP dan SLTA sederajat tersebut akan berdampak pada indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018 indeks pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,59 dengan rata-rata lama sekolah selama 7,18 tahun, atau setara dengan kelas 2 SLTP sederajat. Adapun angka harapan lama sekolahnya bagi penduduk Banyuwangi selama 12,81 tahun. Artinya penduduk Banyuwangi akan mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan hingga di bangku kuliah.

Indikator keberhasilan dari pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari bidang pendidikan dicapai dengan keberhasilan dari masing-masing indikator. Tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah

meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan meningkatnya angka Harapan lama Sekolah (HLS). Kinerja pengeluaran pemerintah dan realisasi anggaran sebagai dukungan terhadap upaya peningkatan indek pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 1.1. ,

Tabel 1.1 Efektitas Anggaran Sektor Pendidikan Kabupaten banyuwangi

Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	Indeks	Efektivitas
2010	67.059.785.000	18.855.970.956	28,12%	< 90%	Tidak Efektif
2011	181.592.446.685	126.111.825.510	69,45%	< 90%	Tidak Efektif
2012	72.013.904.160	58.875.482.044	81,76%	< 90%	Tidak Efektif
2013	104.466.897.656	96.213.318.013	92,10%	90% - 100%	Efektif
2014	207.347.923.949	48.276.843.192	23,28%	< 90%	Tidak Efektif
2015	275.753.497.094	254.112.817.662	92,15%	90% - 100%	Efektif
2016	208.340.998.789	196.504.563.178	94,32%	90% - 100%	Efektif
2017	151.051.595.200	160.120.483.413	106,00%	> 100%	Sangat Efektif
2018	177.631.169.978	175.236.506.487	98,65%	90% - 100%	Efektif
Rata-Rata Kenaikan Anggaran		36,17%			

Sumber : data diolah

Keterangan : Tingkat efektivitas yaitu a) pencapaian > 100% berarti sangat efektif; b) tingkat pencapaian 99%-91% berarti efektif dan c) tingkat pencapaian <90% berarti tidak efektif (Halim, 2008).

Tabel 1.1 menjelaskan efektifitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya anggaran sektor pendidikan. Ketercapaian pembangunan sektor pendidikan dipengaruhi oleh kinerja pengeluaran pemerintah. Perkembangan anggaran pengeluaran pemerintah dari tahun 2010-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Anggaran pendidikan tahun 2010 sebesar Rp. 67.059.785.000,- pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 233.079.303.968,- atau ada kenaikan rata-rata sebesar 36,17%

Realisasi anggaran terhadap pagu anggaran dari tahun 2010-2018 merupakan capaian kinerja anggaran yang dapat dijadikan tolok ukur efektivitas anggaran pemerintah khususnya sektor pendidikan. Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran pengeluaran sektor pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2013 menunjukkan masih belum efektif. Demikian juga tahun 2014 tingkat realisasi anggaran sektor pemerintah tidak efektif. Tetapi pada tahun 2013 dan 2015 sampai 2018, anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sudah efektif sehingga capaian realisasi anggaran dapat dikatakan terserap dalam membiayai pembangunan sektor pendidikan.

Tingkat efektivitas anggaran pemerintah juga dapat diukur kinerja pengeluaran pemerintah atas keberhasilan dan ketercapaian dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Ketercapaian hasil pembangunan sektor pendidikan bisa diukur dengan pencapaian indikator-indikator sektor pendidikan. Kinerja pengeluaran pemerintah sebagai dukungan terhadap upaya peningkatan capaian indikator dalam sektor pendidikan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 - 2018 dilihat pada Tabel 1.2.

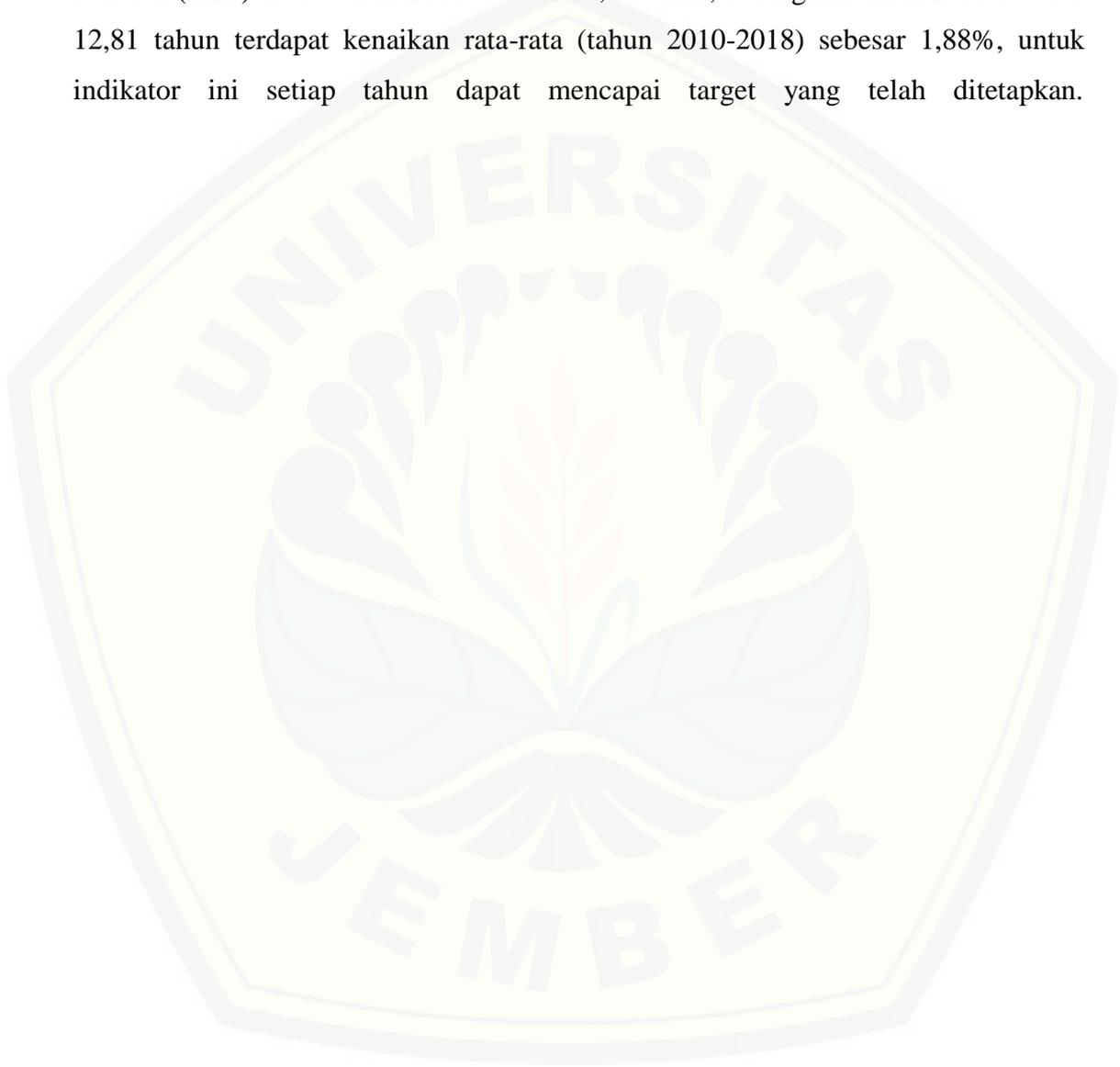
Tabel 1.2 Realiasi Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Tahun	Realisasi indikator			
	Rata-rata Lama Sekolah	Ketercapaian	Harapan Lama Sekolah	Ketercapaian
2010	6,38	Tidak tercapai	11,04	Tercapai
2011	6,53	Tidak tercapai	11,22	Tercapai
2012	6,68	Tidak tercapai	11,25	Tercapai
2013	6,84	Tidak tercapai	11,39	Tercapai
2014	6,87	Tidak tercapai	11,81	Tercapai
2015	6,88	Tidak tercapai	12,20	Tercapai
2016	6,93	Tidak tercapai	12,55	Tercapai
2017	7,11	Tidak tercapai	12,68	Tercapai
2018	7,18	Tidak tercapai	12,81	Tercapai

Sumber : data diolah

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja anggaran tersebut diukur dari terealisasi untuk pembangunan sektor pendidikan, salah satu indikator yang belum mencapai target adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada tahun 2010 sebesar 6,38 tahun sedangkan tahun 2018 sebesar 7,18 tahun dari target sebesar 7,30 tahun, namun demikian terdapat kenaikan rata-rata (tahun 2010-2018) sebesar 1,39%

walaupun demikian masih dapat dikatakan belum efisien untuk penggunaan anggarannya karena target di tahun 2018 tidak tercapai, sehingga harus dilakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan capaian target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk salah satu indikator yang mencapai target adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2010 sebesar 11,04 tahun, sedangkan tahun 2018 sebesar 12,81 tahun terdapat kenaikan rata-rata (tahun 2010-2018) sebesar 1,88%, untuk indikator ini setiap tahun dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



Tabel 1.3. Tingkat Efisiensi Anggaran Sektor Pendidikan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Uraian	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi/ tidak
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	APK PAUD Formal	81,93	107,06	130,67	2.177.467.673.285	25.471.540.550,-	85	Efisien
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,3	7,1	97,40				
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,58	12,68	100,79				
		Angka melanjutkan ke perguruan tinggi	24	51,34	213,92				
2	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	% PAUD akreditasi	69,32	60,02	86,58	10.471.063.164.097	149.764.965.937,-	70	Efisien
		% pendidikan akreditasi A	38	38,92	102,42				
		% pendidikan akreditasi lembaga pelatihan berakreditasi	18,32	32,5	177,40				
3	Terwujudnya sumber daya dan manajemen perangkat daerah	% indeks kepuasan masyarakat	85	85	100	4.713.091.389.150	54.636.913.427,-	86	Tidak efisien
<b>Jumlah</b>						<b>5.787.207.408.844</b>	<b>229.873.419.914</b>	<b>81</b>	<b>Efisien</b>

Sumber : Data diolah, 2018

Kriteria: Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien, antara 21% - 85% berarti efisien dan apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien (Halim, 2008)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa dari tingkat efisiensi pengeluaran pemerintahan daerah menunjukkan bahwa sudah efisien meskipun ada ketercapaian indikator yang belum optimal. Ada 3 indikator kinerja sektor pendidikan pada tahun 2018 terdapat 2 yang belum mencapai target, yang pertama pada unsur Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian kinerja 97,40% (belum 100%) yang disebabkan masih rendahnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang kedua Prosentase PAUD akreditasi dengan capaian 86,58 disebabkan pada tahun 2018 adalah tahun awal adanya akreditasi dan rendahnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga diperlukan upaya dan dukungan untuk meningkatkan capaian indikator yang belum mencapai target, termasuk juga dukungan anggaran. Tabel 1.4 dijelaskan kinerja pengeluaran daerah untuk mendukung ke-3 Indikator kinerja bidang pendidikan pada tahun 2018 pemerintah memberikan dukungan dana sebesar Rp233.079.303.968,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 229.873.419.914,- dan capaian kinerja anggaran sebesar 98,62%

Tabel 1.4. Capaian APK, APS dan APM Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No	Uraian Indikator Pendidikan INDIKATOR	Capaian CAPAIAN
1	APK SD/SD-LB/MI/Paket A	104,47
2	APK SMP/SMP-LB/MTs/Paket B	92,07
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	72,18
4	APS Usia 7 - 12 Tahun	99,78
5	APS Usia 13 - 15 Tahun	97,22
6	APS Usia 16 - 18 Tahun	77,8
7	APM SD/MI/Paket A	99,31
8	APM SMP/MTs/Paket B	79,86
9	APM SMA/MA/SMK/Paket C	62,42

Sumber: LKPJ Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banyuwangi paling tinggi adalah tingkat SD /Mi yakni sebesar 104,47 %, hal menunjukkan bahwa terdapat 4,47 % penduduk yang usianya tidak usia SD (7 – 12) yang masih bersekolah SD. Sedangkan, APK yang paling rendah adalah tingkat SMA / SMK / MA sebesar 72,18. Sedangkan, apabila dilihat dari nilai Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banyuwangi yang paling rendah adalah tingkat SMA / SMK / MA yakni sebesar 62,42, hal tersebut menunjukkan bahwa 62,42 orang bersekolah SMA / SMK / MA. Apabila, dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa APS terendah adalah pada usia 16 – 18 tahun yakni sebesar 77,8 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 22,2 % yang tidak bersekolah pada tingkat umur tersebut.

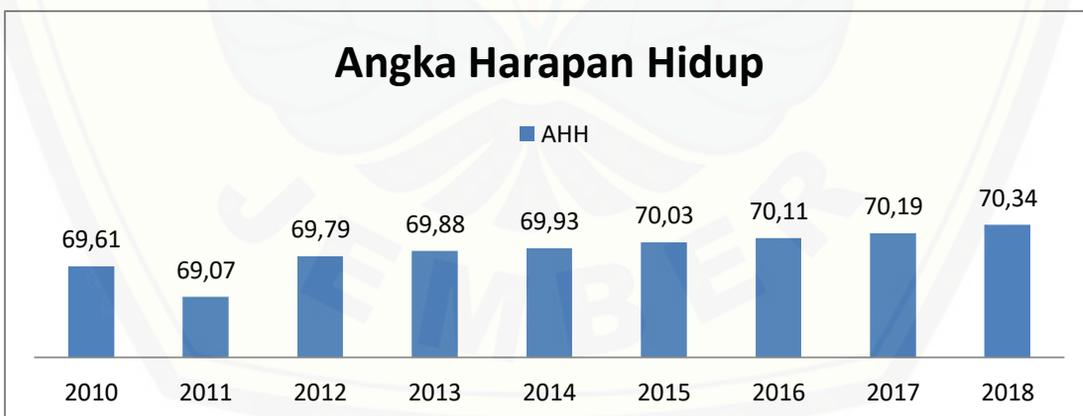
Perkembangan pembangunan manusia Indonesia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal tahun 1970-an sampai lahir 1990-an, sedangkan untuk anggaran pengeluaran pemerintah sendiri, baik itu pengeluaran rutin maupun itu pengeluaran pembangunan (sekarang telah digabungkan) mulai diperhatikan dan dirasakan peningkatannya mulai tahun 1990-an, selama ini pemerintah hanya sibuk dalam mengurus pembangunan infrastruktur, pertumbuhan tersebut memungkinkan penduduk untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih banyak. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan *relative* sedikit, sedangkan investasi di Indonesia yang diharapkan sebagai modal untuk membuka lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat mengalami pasang surut akibat keadaan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil (IHDR,2004).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek pembangunan pada kedua sektor tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Terdapat time lag ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk kedua sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan

runtut waktu (time series) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (Bastian dan Indra, 2010).

Alokasi anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan Kabupaten Banyuwangi. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan, jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) efisien, tepat sasaran, wajar, tidak *underfinancing* (kurang) atau *overfinancing* (berlebih). Terbatasnya anggaran Kabupaten Banyuwangi maka berdampak pada prioritas pengutamakan lebih mengutamakan kepada sektor prioritas wajib dari pada pilihan. Pertimbangan mengutamakan sektor tersebut didasarkan kepada visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Kondisi tingkat kesehatan di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 dapat dilihat dalam Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2.  
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2018



Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi (2018)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2017 berada pada angka 70,19 sedangkan tahun 2018 berada pada angka 70,34. Hal ini menggambarkan bahwa Angka Harapan Hidup akan berdampak pada

indeks Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Semakin tinggi AHH semakin tinggi indeks kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.

AHH Kabupaten Banyuwangi sebagai tolok ukur keberhasilan sektor kesehatan berkaitan dengan anggaran sektor kesehatan. Adanya hubungan antara kinerja pengeluaran pemerintah dengan efisiensi kinerja pengeluaran pemerintah sehingga adanya efisiensi pengeluaran sektor kesehatan tercapai maka keberhasilan masing-masing indikator kesehatan akan tercapai. Kinerja pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terdapat pada Tabel 1.5 yang menjelaskan bahwa anggaran sektor kesehatan Kabupaten Banyuwangi pada sektor kesehatan dipengaruhi oleh kinerja pengeluaran pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 2010-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat efektivitas pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dijelaskan Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Efektitas Anggaran Sektor Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja Anggaran	Indeks	Efektivitas
2010	42.728.727.671	39.143.122.820	91,61%	90% - 100%	Efektif
2011	45.876.396.456	43.683.915.319	95,22%	90% - 100%	Efektif
2012	75.500.597.946	69.697.060.235	92,31%	90% - 100%	Efektif
2013	96.058.416.090	89.756.128.189	93,44%	90% - 100%	Efektif
2014	174.073.465.899	142.218.714.733	81,70%	< 90%	Tidak Efektif
2015	231.567.677.562	201.334.670.219	86,94%	< 90%	Tidak Efektif
2016	339.944.307.550	290.032.919.997	85,32%	< 90%	Tidak Efektif
2017	148.134.650.047	119.314.836.820	80,54%	< 90%	Tidak Efektif
2018	321.312.602.900	296.833.937.070	92,38%	90% - 100%	Efektif

Sumber data : LKPJ 2010-2018 (diolah)

Keterangan : Tingkat efektivitas yaitu a) pencapaian > 100% berarti sangat efektif; b) tingkat pencapaian 99%-91% berarti efektif dan c) tingkat pencapaian <90% berarti tidak efektif (Halim, 2008).

Tabel 1.5 menjelaskan bahwa anggaran kesehatan pada tahun 2010 sebesar 42.728.727.671,- tahun 2018 naik menjadi Rp. 321.312.602.900,- dengan rata-rata kenaikan sebesar 40,09%. Realisasi anggaran terhadap pagu anggaran dari tahun 2010-2018 merupakan capaian kinerja anggaran yang dapat dijadikan tolok ukur

efektivitas anggaran pemerintah khususnya sektor kesehatan. Berdasarkan tingkat efektivitas anggaran pengeluaran sektor pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2013 menunjukkan sudah terealisasi efektif. Demikian juga tahun 2014 sampai 2018, anggaran pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak efektif sehingga capaian realisasi anggaran dapat dikatakan belum sepenuhnya terserap dalam membiayai pembangunan sektor kesehatan..

Indikator keberhasilan sektor kesehatan dicapai dari masing-masing program kesehatan. Adapun kinerja pengeluaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik realisasi anggaran maupun realisasi indikator kinerja tahun 2010 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Realisasi Kinerja Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Tahun	Realisasi indikator			
	AKI per 100.000 KH	Ketercapaian	AKB per 1000 KH	Ketercapaian
2010	59,5	Tidak tercapai	6,71	Tercapai
2011	82,7	Tidak tercapai	6,71	Tercapai
2012	65,8	Tidak tercapai	9,3	Tercapai
2013	142,1	Tidak tercapai	8,2	Tercapai
2014	93,08	Tercapai	6	Tercapai
2015	96,54	Tercapai	6,82	Tercapai
2016	87,3	Tidak tercapai	5,5	Tercapai
2017	82,3	Tidak tercapai	5	Tercapai
2018	102,9	Tercapai	5,9	Tercapai

Sumber data : LKPJ 2010-2018 (diolah)

Tabel 1.6 yang menjelaskan anggaran tersebut terealisasi untuk pembangunan sektor kesehatan, salah satu indikator yang belum mencapai target adalah Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2010 terealisasi sebesar 59,50 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), tahun 2018 sebesar 102,90 per 100.000 KH terdapat penurunan rata-rata (2010 – 2018) sebesar 5,8%. sedangkan Indikator yang mencapai target salah satunya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2010 terealisasi sebesar 7,20 per 1000 KH, tahun 2018 sebesar 5,9 per 100.000 KH ada

penurunan sebesar 1,88%. Sedangkan capaian indikator dan anggaran sektor kesehatan tahun 2018 pada Tabel 1.7.



Tabel 1.7 Capaian Indikator dan Anggaran Sektor Kesehatan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi/ tidak
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan	80	91,54	144,31	124.125.665.000,-	112.307.484.351,60	90,48	Tidak efisien
2	Indeks Kesehatan Keluarga Banyuwangi	0,692	0,701	101,31	4.877.874.300,-	4.659.909.538,-	95,53	Tidak efisien
3	Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan (per 100.000 KH)	98	102,9	95,22	377.500.000,-	318.669.300,-	84,42	Efisien
4	% Fasilitas kesehatan terakreditasi	60%	51,82%	86,37	11.287.153.000,-	9.954.865.330,-	88,20	Tidak efisien
5	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	8,25	5,9	139,8	150.000.000,-	149.443.400,-	99,63	Tidak efisien
6	Tingkat Kesehatan Rumah Sakit	74	77,53	104,53	180.494.410.600,-	169.443.565.150,-	93,88	Tidak efisien
				<b>Jumlah anggaran</b>	<b>321.312.602.900,00</b>	<b>296.833.937.069,74</b>	<b>92,38</b>	<b>Tidak efisien</b>

Sumber : Data diolah, 2018

Kriteria: Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien, antara 21% - 85% berarti efisien dan apabila hasilnya > 85% berarti tidak efisien (Halim, 2008)

Tabel 1.7 menjelaskan bahwa dari 6 indikator kinerja Sektor kesehatan pada tahun 2018 terdapat 4 indikator mampu melebihi target yang ditentukan sedangkan 2 indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Yang pertama Prosentase fasilitas kesehatan terakreditasi dengan capaian sebesar 86,37%, (belum 100%) yang disebabkan masih rendahnya fasilitas layanan kesehatan, terutama pihak swasta masih banyak yang belum sadar dengan pentingnya akreditasi dalam layanan kesehatan kepada masyarakat, yang kedua Angka Kematian Ibu (AKI) dengan capaian sebesar 95,22% yang disebabkan kurangnya pemahaman ibu melahirkan bahwa selain kesehatan bayi juga harus diutamakan kesehatan dirinya. Capaian indikator yang tertinggi adalah cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang mencapai 144%. Dalam Tabel diatas dijelaskan Kinerja pengeluaran daerah untuk mendukung ke-6 Indikator kinerja sektor kesehatan pada tahun 2018 pemerintah memberikan dukungan dana sebesar Rp. 321.312.602.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 296.833.937.069,74 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,38%

Salah satu faktor yang mempengaruhi sebuah sektor menjadi sektor prioritas adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih terhadap rencana dan strategi kedepan. Adanya RPJMD tentunya pemerintah daerah mempunyai patokan perencanaan dalam mengimplementasi pembangunan daerah yang berdampak baik kepada kesejahteraan ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, indikator kualitas sumberdaya manusia dilihat dari sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor prioritas dalam kinerja pengeluaran pemerintah.

Kinerja pengeluaran daerah belanja daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan Kabupaten Banyuwangi. Komposisi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga dan belanja transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 2.932.152.201.493,82 dan terealisasi sebesar Rp. 2.744.070.093.041,80 atau

mencapai 93,59 %. Untuk program dan kegiatan prioritas telah dianggarkan dalam RKPD setiap tahunnya dan setiap akhir tahun akan dilaporkan melalui laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Banyuwangi dengan anggaran kegiatan untuk urusan wajib dalam mendukung seluruh kegiatan dan akses peningkatan IPM baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan seperti Tabel 1.8 berikut :

Tabel 1.8. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018

Tahun	Pendidikan		Capaian	Kesehatan		Capaian
	Alokasi	Realisasi	(%)	Alokasi	Realisasi	(%)
2017	151.051.595.200	160.120.483.416	106,00	148.134.650.047	119.314.836.820	80,54
2018	177.631.169.978	175.236.506.487	98,65	321.312.602.900	296.833.937.069,74	92,38

Sumber: LKPJ Kabupaten banyuwangi, Tahun 2017-2018

Berdasarkan Tabel 1.8 menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mempertimbangkan pengeluaran pemerintah daerahnya. Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah Nursyawalina (2005). Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Sektor prioritas wajib kabupaten Banyuwangi yakni sektor pendidikan dan sektor kesehatan termasuk kedalam alokasi anggaran yang bersifat langsung. Anggaran sektor pendidikan berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan pendidikan. Sejalan dengan sektor pendidikan, alokasi anggaran untuk kesehatan juga akan berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti halnya akses untuk kesehatan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Beberapa empiris yang bermunculan untuk membahas keterkaitan kinerja kebijakan fiskal terhadap sektor prioritas masih menunjukkan hasil yang bervariasi, hal tersebut terjadi karena perbedaan perspektif dalam memandang performansi sektor prioritas masing-masing

daerah dan indikator lain. Maka perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kebijakan fiskal terhadap sektor prioritas daerah.

Churchill *et.al* (2015) menemukan bahwa pengaruh pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi positif, sedangkan efek pengeluaran kesehatan pemerintah negatif terhadap peningkatan kesehatan. Craigwell *et al.*, (2012) menemukan bahwa pengeluaran kesehatan memiliki efek positif yang signifikan pada status kesehatan, sementara pengeluaran untuk pendidikan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar baik pada pendaftaran sekolah dasar atau sekolah menengah. Sedangkan Solikhin *et.al* (2017) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan relatif tidak efisien. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (PPP) tidak memiliki dampak signifikan pada indeks pendidikan, sementara pengeluaran Rumah Tangga untuk pendidikan (PPRT) dan product Domestic Bruto (PDRB) per kapita positif memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Pendidikan (IP), Faisol *et al.* (2017) menemukan bahwa skor efisiensi pengeluaran publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Kahang, Merang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara signifikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dengan indikator IPM, sedangkan untuk sektor kesehatan tidak signifikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dengan indikator IPM. Limanli dan Omer (2015) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan variabel yang sangat penting ketika kemiskinan rumah tangga, masalah utamanya adalah kualitas kesehatan dan pendidikan. Korankye (2018) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketersediaan layanan publik, dan hak-hak mereka.

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya serta menuju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Bastian dan Indra, 2010).

Fenomena dan fakta yang ada di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri (Rasidin dan Bonar, 2004)

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan dengan judul “Kinerja Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi “.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi faktual (*eksisting*) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana kinerja pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana strategi kinerja anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kondisi faktual (*eksisting*) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis kinerja pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis strategi kinerja anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan khususnya kajian Ilmu Ekonomi Pembangunan dan menjadi bahan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dengan kajian yang lebih mendalam tentang kinerja pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan;

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banyuwangi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;

##### 3. Manfaat peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktis penulis tentang masalah pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat di Banyuwangi

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Landasan teori meliputi pembangunan, teori pengeluaran pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dan *human capital* seperti dijelaskan berikut.

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Halim (2009), keuangan daerah dapat diartikan: “Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Menurut Halim (2009), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah terdapat sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

## 2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

WW. Rostow dan RA. Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas, bersamaan dengan itu porsi investasi swasta juga meningkat (Dumairy, 1997).

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, Sadono, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno (1999), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan

tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa serta pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan dalam upaya mewujudkan pembangunan (Sukirno, Sadono, 2002; Wahyuni, I.G, Made S. Yuliarmi, 2014). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif paling kecil dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, namun efek yang ditimbulkan cukup besar, baik sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi (Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus, 2001).

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave rasio investasi total terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap PDB akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat pada tahap lanjut pembangunan ekonomi terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave melandasi pendapatnya berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak negara (Dumairy, 1997).

Sedangkan menurut teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Adolph Wagner, ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidak efisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menentukan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, Guritno, 1994). Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X - M)$  yang merupakan legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut (Sukirno, Sadono, 2000). Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave dalam (Sukirno, 2000) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Sukirno, 2000).

Berdasarkan pemaparan Musgrave dalam Sukirno (2000) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran (*budget policy*) dapat memengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu:

a) *Resources Transfer* (Perpindahan sumber daya)

Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/transfer input dari perseorangan (individu/swasta) kepada masyarakat. Kenaikan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang/jasa publik akan meningkatkan penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu perekonomian.

b) *Incident* (Distribusi pendapatan)

Perubahan alokasi input akibat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang sudah mencapai *full employment* jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti transfer input dari swasta kepada penggunaan untuk publik sehingga pendapatan riil swasta akan menurun. Disisi lain peningkatan pengeluaran tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari peningkatan penggunaan input untuk publik.

c) *Output Effect* (Perubahan Terhadap Output)

Menganalisis bagaimana fungsi pajak untuk mengatur pendapatan keuangan sebagai dasar perubahan pajak. Transfer sumber daya untuk digunakan masyarakat juga meningkat. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output dalam suatu perekonomian (*Product Domestic Bruto/PDB*) maupun penerimaan riil. Seperti diketahui perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya mempengaruhi output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran

berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output dalam suatu perekonomian (*Product Domestic Bruto/PDB*) maupun penerimaan riil (Samuelson dan Nordhanus, 2001). Seperti diketahui perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi input yang selanjutnya mempengaruhi output yang akan dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan di dalam distribusi dikenal sebagai timbulnya anggaran berimbang. Anggaran berimbang yaitu jumlah yang diambil pemerintah seluruhnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian (Wagner dalam Muslim, 2003). Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin antara lain mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja tak terduga, belanja tak termasuk bagian lain serta bunga dan cicilan hutang. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Sedangkan penerimaan pemerintah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain yang sah (Badan Pusat Statistik). Berkaitan dengan pengeluaran pemerintah berlaku Hukum pengeluaran pemerintah yang makin meningkat (*Law Of Growing Public Expenditure*) atau hukum kegiatan pemerintah yang makin meningkat yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam Dumairy (1999), menyatakan bahwa dengan makin majunya masyarakat, makin meningkatnya jumlah penduduk, makin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah menurut Suparmoko (2000) dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan suatu investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan penilaian ini dapat dibedakan macam-macam pengeluaran (Suparmoko, 2000)

1. Pengeluaran yang *Self-Liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/ barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lainnya akhirnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran yang tidak *Self-Liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek turisme dan sebagainya. Hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Kemudian menurut Shah dalam Eddy (2005) pengeluaran pemerintah daerah antara lain dapat diukur berdasarkan kebutuhan fiskal (*fiscal need*) suatu daerah. Kebutuhan fiskal adalah jumlah kebutuhan pelayanan publik standar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan standar tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal antara lain pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi,

kesejahteraan sosial, jumlah penduduk, luas wilayah kepadatan penduduk serta pelayanan publik.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah sesuai Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 24, dijelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, keuangan daerah melingkupi:

1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri maupun dari pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum.

Menurut Haryanto dkk. (2007), dikatakan bahwa melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Dengan kebijakan normatif yang ada, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dasar – dasar yang melatarbelakangi perubahan adalah: pertama, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah seiring otonomi daerah dan desentralisasi, kedua, semangat *reinventing governance and good governance*, dan ketiga, realitas regulasi dan instrumen pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang baru dann mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. Hak Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Memungut pajak dan restribusi daerah serta mengelola kekayaan daerah;
2. Memperoleh dana perimbangan, dan
3. Melakukan pinjaman.

Dalam melaksanakan hak tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk:

1. Mengelola sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan taat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mensinergikan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional; serta
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat

Untuk regulasi penganggaran daerah, seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Haryanto dkk., 2007). APBD disetujui oleh DPRD secara rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja (UU APBD pasal

15), disusun sesuai dengan kebutuhan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Anggaran pembangunan merupakan mata rantai yang mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pembangunan itu sendiri, baik keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan dengan kedepan (*forward linkage*). Dengan demikian anggaran pembangunan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan.

#### **2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**

Teori *Pattern of Development* yang dirumuskan Chenery menitikberatkan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami proses transformasi ekonomi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan. Teori ini disusun berdasarkan pengalaman bahwa perubahan ekonomi negara terjadi sejalan peningkatan pendapatan per kapita.

Chenery et al. (1997), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan pada dasarnya merupakan hasil dari serangkaian proses yang melibatkan perubahan-perubahan struktural sepanjang periode transisi pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian perubahan yang melibatkan proses akumulasi, proses alokasi sumber daya dan proses pendistribusian serta transformasi kependudukan yang mengakibatkan dua kemungkinan, yaitu gagal atau sukses dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi modern. Konsep pembangunan tidak dipandang dalam arti dikotomi maju atau tidak maju, melainkan sebuah transisi dari suatu keadaan menuju suatu keadaan lainnya.

Chenery et al. (1986) mengartikan pola pembangunan adalah pola perubahan struktural. Pola perubahan struktural adalah variasi-variasi yang bersifat sistematis dalam beberapa aspek struktur sosial ekonomi yang berkaitan dengan meningkatnya level pendapatan atau indeks pembangunan lainnya. Proses pertumbuhan ekonomi secara formal dideskripsikan sebagai hasil dari perluasan dalam sumber daya produktif dan peningkatan efisiensi penggunaannya. Selama episode pembangunan, pertumbuhan *total factor productivity* (TFP) mengalami peningkatan yang cepat. Hal ini terjadi karena akumulasi kapital berperan sebagai tempat melekatnya perubahan-perubahan teknologi yang diperlukan untuk merealokasi sumber daya antar sektoral. Demikian pula, pengaruh-pengaruh *embded* perubahan teknologi dalam kapital memungkinkan tingkat laju investasi yang lebih tinggi untuk menjamin kelangsungan pemenuhan permintaan agregat dan mencegah terjadinya pengangguran kapasitas produksi.

Chenery membagi tahapan pembangunan ekonomi atas tiga tahap yaitu tahap awal, tahap pergeseran pusat kegiatan ekonomi dan tahap perekonomian maju. Pada tahap awal proses transformasi dicirikan oleh dominannya aktivitas-aktivitas primer yang mana pertanian merupakan sumber utama peningkatan *output* dan barang-barang yang diperdagangkan. Pada tahap ini terjadi perlambatan pertumbuhan secara keseluruhan. Perlambatan pertumbuhan secara agregat adalah lebih dikarenakan oleh rendahnya pertumbuhan produktivitas dibandingkan dengan tingkat investasi. Tahap kedua proses transformasi dicirikan oleh pergeseran pusat kegiatan ekonomi dari produksi primer menuju manufaktur. Pergeseran ini bisa terjadi pada tingkat 30 pendapatan per kapita yang lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada sumberdaya *endowment* dan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan dengan negara lain. Tahap ketiga adalah mencapai perekonomian maju yang dicirikan oleh elastisitas pendapatan untuk barang-barang manufaktur menurun, dan pada saat bersamaan

kontribusi dalam permintaan domestik mulai jatuh. Kondisi secara mendasar tercermin dalam penurunan kontribusi manufaktur baik dalam pembentukan GDP dan penyerapan angkatan kerja. Menurut Chenery dalam Sukirno (2006), transformasi struktur produksi adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian secara signifikan lebih rendah dibandingkan seluruh sektor ekonomi lainnya. Pada tahap awal pembangunan produktivitas sektor pertanian tertinggal dibandingkan seluruh sektor ekonomi lainnya. Kesenjangan produktivitas sektoral ini mencerminkan bukan saja perbedaan sifat fungsi produksi dan tingkat perubahan teknologi melainkan juga oleh rendahnya mobilitas sumberdaya. Realokasi sumber daya berpengaruh signifikan dalam mempercepat pertumbuhan. Ketika migrasi dan akumulasi kapital mengurangi kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian maka upah relatif di sektor pertanian meningkat dan sebagai hasilnya gap produktivitas sektoral semakin berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut teori pembangunan Chenery menegaskan bahwa perubahan struktural dibutuhkan bagi kelangsungan pertumbuhan namun demikian selama proses berlangsung tidak selamanya berjalan mulus atau tanpa ada suatu kekacauan. Disamping itu, perubahan struktural juga mensyaratkan pemerintah dapat bertindak bijaksana dan penduduk bersedia untuk dapat beradaptasi dalam hal perbedaan kondisi kerja dan gaya hidup dengan sendirinya.

Hipotesis utama dari teori di atas adalah bahwa model perubahan struktural yang terjadi pada tiap-tiap negara sebenarnya dapat diidentifikasi dan proses perubahan secara umum dari masing-masing negara pada dasarnya memiliki kesamaan pola. Meski demikian teori ini toleran terhadap variasi-variasi kecil yang terjadi dalam proses perubahan struktural yang mungkin berbeda antar negara. Perbedaan faktor *endowment*, kebijakan pemerintah, dan aksesibilitas terhadap modal dan teknologi, merupakan faktor penjelas penting terhadap perubahan perbedaan variatif transformasi struktural yang terjadi.

### **2.1.5. Teori *Human capital***

Stockley (2003) menyatakan bahwa *Human Capital* merupakan teori yang menjelaskan manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting, yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan, sama seperti halnya aset fisik misal mesin dan modal kerja. Sikap, ketrampilan dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Menurut Fitzenz,

J. (2000) pengertian *Human Capital* dapat dijelaskan sebagai suatu kombinasi dari faktor-faktor-sifat

- a. Seseorang yang dibawanya sejak lahir ke dalam pekerjaan, inteligensi, energi, sikap yang secara umum positif, reabilitas, dan komitmen.
- b. Kemampuan seseorang untuk belajar, bakat, imajinasi, kreativitas, dan apa yang sering disebut sebagai street smart (akal kecerdasan).
- c. Motivasi seseorang untuk berbagi informasi dan pengetahuan, semangat tim dan orientasi tujuan.

Menurut Shultz's *Human Capital is all human abilities to be either innate or acquired. Attributes .. which are valuable and can be augmented by appropriate investment will be Human Capital* (Houghton, E. 2017). *Human Capital* merupakan kunci dari segala kegiatan operasional perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai tambah pada perusahaan dan mampu mendukung proses operasional yang dinamis (Rahmawati, 2017). *Human Capital* menyangkut seluruh aset di dalam pendidikan baik pikiran, pembelajaran, energi, pemahaman maupun dalam strategi pelaksanaan pembelajaran. Menurut Nalbantian mendefinisikan *humancapital* sebagai persediaan dari kumpulan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas dan atribut pekerja lainnya dan berpendapat bahwa *Human Capital* juga mencakup “memberi nilai pada setiap atribut ini serta menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mengelola organisasi” (Putri, 2013).

Menurut Bong (2009) mengatakan bahwa konsep *Human Capital* (modal sumber daya manusia) terdiri dari 3, yaitu aspek individu (*individual aspect*), modal manusia (*human capital*), dan perspektif yang berorientasi pada produksi (*production oriented*) (Hidayat, 2013:880) diartikan bahwa:

- a. Aspek individu sangat mempengaruhi kehidupan sumber daya yang maju. Perlunya niat dan motivasi yang dapat mengembangkan dan dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik. Aspek ini timbul dari dalam diri setiap individu, hasilnya akan jelas apabila individu memiliki keinginan dan tekad yang kuat untuk melakukan sesuai dengan konteksnya.
- b. Modal manusia atau *Human Capital* merupakan *basic needs* yang tidak dapat dilepaskan untuk mengembangkan sesuatu capaian yang dituju. *Human*

*Capital* dapat dimiliki ketika pemanfaatan sumber daya itu sesuai pada jalur yang tepat dengan menggunakan metode-metode yang inovatif serta kreatif dalam menjalankan kegiatan. Modal manusia perlu ditinjau dari mana asal dan sumbernya. Baik dari pengelolaan sumber daya maupun dari support pemerintah.

Dalam menjalankan modal, individu harus memiliki pandangan orientasi yang tepat (sesuai sasaran). Orientasi yang tepat akan menghasilkan dampak yang baik dan bermanfaat. Maka yang diperlukan adalah pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan atau evaluasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah orientasi pelaksanaan sesuai dengan jalur awal atau sudah menyimpang dari perpektif dan tujuan awal. Dengan objek yang tepat maka adanya peningkatan hasil, arah kejelasan tujuan modal dan mutu yang dihasilkan. Sedangkan menurut Salehnudin yang dikutip dari buku Barker menjelaskan bahwa konsep *Human Capital* adalah: manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi (Salehnudin, 2010). Dalam penjelasannya bahwa manusia juga merupakan modal.

Hubungan *Human Capital* dengan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan keterkaitan yang sulit untuk dipisahkan, karena dengan tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi mempengaruhi pula kualitas dari *Human Capital* itu sendiri, semakin berkualitas sumber daya semakin tinggi pula nilainya sebagai sebuah modal maupun investasi, karena melalui pendidikan dapat meningkat skill, pengetahuan, kreatifitas, potensi dan keahlian yang dimiliki oleh manusia sebagai sumber daya.

Konsep *Human Capital* muncul, karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia. *Human Capital* muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan aset yang memiliki banyak kelebihan yaitu kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarakan tidak akan berkurang melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi organisasi, manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna, manusia mampu berbagi intelegensia dengan pihak lain.

*Human Capital* merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Di setiap sekolah tentu memiliki upaya dan usaha agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Demikian juga telah dibahas di dalam konsep pendidikan maupun konsep *Human Capital* bahwa harus ada individu (sekolah, lembaga pendidikan) yang mengelola untuk menjalankan modal sesuai dengan objek. Dengan demikian, ada beberapa hubungan antara pendidikan dengan *Human Capital*, yakni:

- a. Dalam menjalankan pendidikan membutuhkan modal (dana)  
Model inilah yang menjadi basic needs dalam menjalankan pendidikan. Modal dapat diperoleh melalui usaha yang dikerjakan setiap sekolah, misalkan melalui dana dari pemerintah (dana BOS) berguna untuk menunjang operasional sekolah-sekolah. Atau juga dapat diperoleh melalui hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga atau donatur. Pemanfaatan harus sesuai dengan objek (sasaran) yang sesuai dengan program di sekolah-sekolah.
- b. Melalui *Human Capital* pendidikan mengalami perkembangan  
Berjalannya pendidikan ke arah yang baik, hal itu dipengaruhi oleh *Human Capital* (sumber daya manusia). Sumber daya manusia yang baik dapat menunjang keberlangsungan pendidikan. Perkembangan dan perubahan pendidikan kelihatan apabila pendidikan dapat terealisasi secara baik dan sesuai tujuan (visi dan misi).
- c. Kontribusi *Human Capital* dapat memberikan pertumbuhan pada Pendidikan.  
Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika Theodore Schultz, yang merupakan peletak dasar teori *Human Capital* modern, berpidato dengan judul “*Investment in Humman Capital*” di hadapan *The American Economic Association*. Pesan utama dari pidato tersebut sederhananya adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Dalam pandangannya menjelaskan bahwa pendidikan juga merupakan investasi yang dapat diberdayakan untuk memajukan bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan keberadaan sumber daya yang ada sebagai sumber yang dapat memberikan kontribusi lebih demi pendidikan.

d. Sumber Daya Manusia meningkatkan kualitas pendidikan

Dalam tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang tidak memadai bahkan ada yang tidak mencicipi pendidikan seperti program-program pemerintah. Hal ini disebabkan karena kehidupan yang nomaden dan sumber informasi tidak didapat (tidak sampai). Tetapi sebenarnya apabila sumber daya dapat dikelola dengan baik maka kehidupan di Indonesia tidak mengalami kemerosotan pendidikan.

e. Kemakmuran pendidikan berdasarkan sumber daya

Kehidupan pendidikan dipandang makmur apabila sumber dayanya dapat menunjang kegiatan dan aktivitas pendidikan secara berkesinambungan. Pendidikan yang memiliki sumber daya yang baik dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus. Artinya bahwa kemakmuran (tersedianya) fasilitas baik sarana maupun prasarana maju karena sumber daya manusia yang dikelola dengan baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang pengeluaran pemerintah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan terdapat persamaan penelitian sama-sama meneliti tentang Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, namun terdapat perbedaan terletak pada objek, variabel independen dan metode analisis data, lokasi dan hasil penelitiannya, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun), Judul	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Churchill <i>et al.</i> , 2015/ <i>Effects of Government Education and Health Expenditures on Economic Growth</i>	Pengeluaran pemerintah dan belanja bidang pendidikan dan kesehatan	Meta analisis	Pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap kualitas pendidikan tetapi pengeluaran pemerintah berdampak negative terhadap kualitas kesehatan
2	Craigwell <i>et al.</i> , 2012/ <i>The Effectiveness of Government Expenditure on Education and Health Care in the Carribean</i>	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan	<i>Ordinary Least Square (OLS)</i>	Pengeluaran kesehatan memiliki efek positif yang signifikan pada status kesehatan, sementara pengeluaran untuk pendidikan tidak memiliki pengaruh yang cukup besar baik pada pendaftaran SD atau SMP
3	Solikhin <i>et al.</i> (2017)/ <i>Efficiency and effectiveness of Government expenditure on Education at Districs/ Cities Level in East Java Indonesia</i>	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	Data Envelopment Analysis (DEA)	Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan relative tidak efisien. Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan (PPP)
4	Faisol, <i>et al.</i> (2017)/ <i>Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo</i>	Pengeluaran pemerintah pendidikan, kesehatan dan pertumb.ekonomi	<i>Stochastic Frontier Analysis (SFA)</i>	Skor efisiensi pengeluaran publik memiliki korelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi

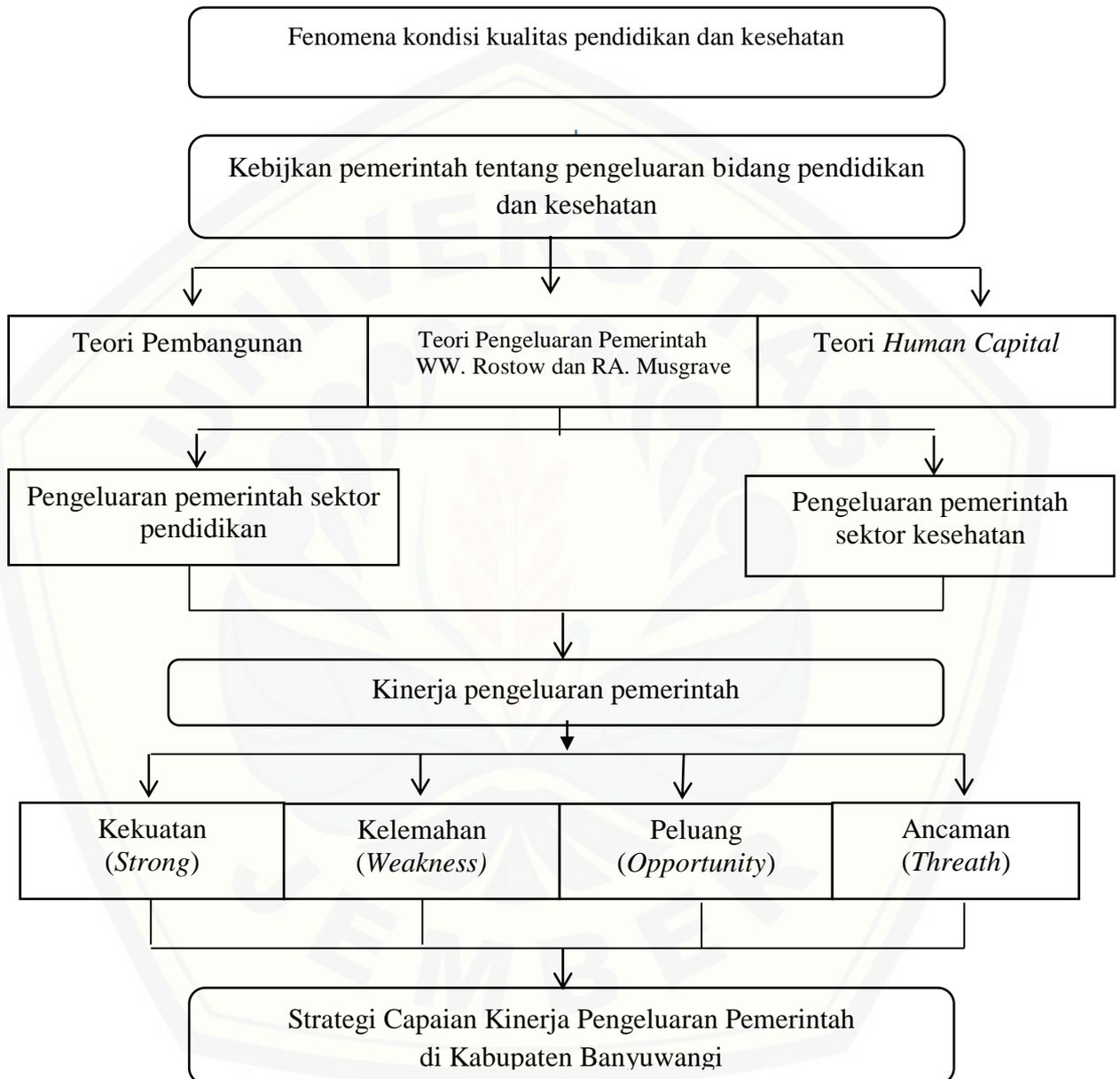
No.	Penulis (Tahun), Judul	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
6	Astri, dkk. (2013)/ Pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Indonesia	Pengeluaran pemerintah Pendidikan, Kesehatan, IPM	Metode statistic inferensial	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara parsial berpengaruh pada pada IPM namun pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh pada IPM
7	Limanli and Omer (2015)/ <i>Intertemporal poverty in Turkey</i>	Survei Pendapatan dan Kondisi Kehidupan	Statistik deskriptif	Kesehatan dan pendidikan merupakan variabel yang sangat penting ketika kemiskinan rumah tangga. masalah utamanya adalah kualitas kesehatan dan pendidikan. Terakhir, rasio jenis pekerjaan memiliki pengaruh besar pada distribusi penghasilan di antara penduduk yang bekerja
8	Pe Leah et al. (2017)/ <i>Sustainable HDIndex</i>	Pendidikan, kesehatan dan standar hidup	Studi deskriptif	Pendidikan, kesehatan dan standar hidup merupakan ukuran untuk menilai kualitas hidup
9	Nartguin et al. (2017)/ <i>Examination of 2015 Human Development Index in Terms of Education: Comparison of the Continents and Turkey</i>	Ketidaksetaraan dalam pendidikan dan indeks ineqaulity disesuaikan dlm pendidikan, kepuasan dengan kualitas mobilitas internasional, tenaga kerja dg pendidikan	Studi deskriptif	Turki tidak optimal dalam nilai kualitas manusia. Turki harus berinvestasi lebih banyak untuk pendidikan agar memiliki kinerja yang lebih baik.

No.	Penulis (Tahun), Judul	Variabel	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
10	García et al. (2017)/ <i>Analysis of the vicious circle of poverty and social xclusion of the gypsy woman in the neighbor hood of Los osales, Murcia</i>	Indeks perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, interkulturalitas, hubungan pasangan, keadilan dan partisipasi sosial.	Kualitatif	Kemajuan dalam hal bantuan sosial (perumahan, manfaat, sumber daya sosial, beasiswa, dll) hilang sebagai konsekuensi dari pengurangan sosial. Hal yang sama terjadi dengan memperkuat edukasi, dg memberikan pekerjaan rumah
11	Ottay <sub>1</sub> et al. (2015)/ <i>Coastal Area Public Health Problem (A Case Study in the City of Manado North Sulawesi Indonesia)</i>	Kesehatan masyarakat, lingkungan (wilayah pesisir kota Manado) dan perilaku sosial.	Studi eksplorasi observasi lapangan dan penelusuran literatur	Banyak masalah kesehatan di Indonesia kota pesisir yang dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu lingkungan penentu, dan perilaku sosial.
12	Korankye et al. (2018)/ <i>Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature</i>	Kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan korupsi	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penyebab kemiskinan berkaitan dengan kesehatan, ketersediaan layanan publik, dan hak-hak mereka. Kemiskinan di Afrika disebabkan oleh korupsi dan tata pemerintahan yang buruk, infrastruktur yang buruk, penyakit dan fasilitas kesehatan yang buruk

Sumber : berbagai penelitian

## 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan teori dalam penelitian maka kerangka penelitian dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Bab 3 ini akan menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, metode analisis data yang digunakan. Selanjutnya, proses estimasi tersebut digunakan pula untuk mengestimasi variabel-variabel yang diperoleh dari sumber data serta hasil estimasi digunakan untuk menjawab pertanyaan empiris.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kinerja pengeluaran pemerintah, kesehatan dan pendidikan serta menentukan strategi meningkatkan kinerja keuangan khususnya pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan. .

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait, meliputi Badan Pusat Statistik Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda dan instansi-instansi terkait lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2010-2018. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber:

- a. Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan, diperoleh dari BPS Kabupaten Banyuwangi, Potensi Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bappeda).
- b. Data pendidikan, kesehatan dan penduduk Kabupaten Banyuwangi (BPS), Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka (BPS).

### 3.3 Tahapan Penelitian

Kajian ini bersifat eksploratif dan deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran kinerja pengeluaran pemerintah. Efisiensi kinerja pengeluaran pemerintah dilakukan dengan *log frame* dan strategi dianalisis dengan SWOT. Kerangka operasional kajian berangkat dari berbagai isu pentingnya Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan dalam upaya meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada responden untuk menganalisis strategi dengan SWOT. Kuisioner dibagikan kepada responden sebanyak 30 orang dimana responden terdiri dari pihak internal yaitu pihak pegawai dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan sebanyak 16 orang. Sedangkan responden dari pihak eksternal adalah masyarakat yang merasakan pembangunan pendidikan dan kesehatan sebanyak 14 orang.

Teknik pengumpulan data dengan sumber pustaka dan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mencatat, dan menganalisis data sekunder yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta sumber literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen dan laporan yang dibuat oleh instansi terkait seperti bentuk kinerja pengeluaran daerah, sektor pendidikan dan kesehatan yang di kerjasamakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi dan data lain-lain.

### 3.5 Metode Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan empiris mengenai pengaruh standar hidup layak, kesehatan, pendidikan dan kependudukan terhadap variabel terikat yakni IPM, maka digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Tujuan penggunaan kedua metode analisis data tersebut adalah untuk saling mendukung analisis.

### 3.5.1 Analisis Matrik Logframe

Matriks logframe merupakan hasil dari analisis-analisis sebelumnya yang menyajikan ringkasan apa yang menjadi tujuan program dan bagaimana melakukannya, apa yang menjadi asumsi dasar, dan bagaimana *output* dan *outcome* dimonitor dan dievaluasi. Struktur matriks logframe terdiri dari hirarki tujuan (*goal, objectives, outcome*), kegiatan, indikator pengukuran, metode verifikasi, dan asumsi. Tabel 3.1 contoh struktur matriks logframe:

Tabel 3.1. Matriks Logframe

Hirarki Logis	Indikator	Alat Verifikasi Indikator (Sumber Pembuktian)	Asumsi
<i>Goal</i> /Tujuan	Indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya tujuan program/project	Bukti kualitatif (fisik) maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
<i>Purpose/objectives</i> /sasaran	Indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya sasaran program/project	Bukti kualitatif (fisik) maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
<i>Intermediate result</i> /program/pencapaian perubahan	Indikator yang menunjukkan adanya pencapaian perubahan	Bukti kualitatif (fisik) maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
<i>output</i> /keluaran	Indikator yang menunjukkan adanya output atau keluaran yang dihasilkan	Bukti kualitatif (fisik) maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
<i>Activities</i> /input/	Indikator yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan (termasuk biaya, SDM, dll)	Bukti kualitatif (fisik) maupun kuantitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	Asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external

Konstruksi matriks *logframe* memerlukan logika sebab-akibat yang merupakan rasionalisasi dari setiap hirarki tujuan, seperti gambaran berikut ini:

1. Jika input disediakan, maka rencana kerja akan dilaksanakan
2. Jika rencana kerja dilaksanakan, maka *output* akan dihasilkan
3. Jika *output* dihasilkan, maka *intermediate result* akan tercapai
4. Jika *intermediate result* tercapai, maka *purpose* akan tertopang
5. Jika *purpose tertopang*, maka akan berkontribusi pada *ultimate goal*

Prinsip dasar dari logika tersebut adalah pencapaian tujuan di hirarki yang lebih rendah mendukung pencapaian hirarki yang lebih tinggi yang pada gilirannya berdampak pada capaian hirarki tujuan yang paling tinggi (*goal*). Dalam memahami kerangka kerja logis, dalam implementasi pemerintahan dapat disebut pula dengan anggaran berbasis kinerja perlu dipahami beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Tujuan/*goal*, merupakan capaian akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan atau program pembangunan sebagai bentuk kesinambungan dari pencapaian maksud program. Biasanya, tujuan/*goal* diletakkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas berskala nasional yang dicapai melalui keterpaduan antara bidang atau sektor. Tujuan dirumuskan dalam satu pernyataan.
- b. Sasaran/*Strategic Objectives/Purpose/Outcome*, merupakan perubahan yang diharapkan akan dicapai melalui pelaksanaan program atau setiap aspek pengembangan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis dapat dicapai apabila hasil antara/*intermediate result* telah tercapai. Sasaran merupakan target-target yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran dapat dinyatakan dalam beberapa rumusan.
- c. *Intermediate Result/Program*, merupakan capaian atau hasil-hasil perubahan perilaku yang diharapkan dalam rangka pencapaian sasaran atau *strategic objectives*.
- d. Hasil kerja dari kegiatan/*Output*, menunjukkan apa yang harus dicapai dari pelaksanaan program dalam rangka pencapaian maksud program. Biasanya *output* merupakan hasil-hasil yang dicapai dari sejumlah atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan melalui sejumlah program. Dengan kata lain *output* merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan.

e. *Activities/input*, merupakan serangkaian kegiatan atau tindakan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh atau mencapai hasil kerja/*output*.

Langkah-langkah pengisian dapat dilakukan dengan logika deduktif-induktif, yaitu berfikir berdasarkan asumsi umum kemudian dilakukan spesifikasi (dari tujuan/goal hingga kegiatan) atau dengan pola berfikir induktif–deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus menuju arah yang lebih umum (dari kegiatan ke tujuan/goal).

## Tahap 1

1. Pengisian lajur Hirarki logis
  - a. Kegiatan merupakan fungsi dari tindakan yang harus dilakukan dan dikelola untuk mencapai *output*.
  - b. *Output* merupakan hasil-hasil kerja dari kegiatan dalam bentuk barang/material, jasa, pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. *Output* muncul secara langsung sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan/proyek. Manajemen proyek bertanggung jawab dan harus mampu menjamin *output* tetap relevan dan sesuai.
  - c. *Intermediate Results* (IR) merupakan gambaran program/perubahan perilaku yang telah diantisipasi sebagai hasil dari *output* kepada sasaran proyek atau pemanfaat. IR menunjukkan bagaimana sasaran proyek menggunakan atau memanfaatkan barang, jasa, pengetahuan dan/atau keterampilan yang diberikan proyek. Perubahan perilaku ini bisa terjadi pada orang, sistem atau organisasi. IR biasanya di luar kontrol manajemen proyek, tetapi tetap di bawah tanggung jawabnya.
  - d. *Strategic objectives* (SO) merupakan gambaran hasil/ sasaran atau dampak yang diharapkan dari perubahan perilaku yang terjadi di tingkat IR. Hasil ditingkat SO secara realistis dapat dicapai pada akhir proyek. Oleh karena itu, SO menjamin fokus proyek dan menjadi alasan mengapa proyek tersebut perlu dilaksanakan. SO berada di luar kontrol manajemen proyek dan mensyaratkan terjadinya perubahan perilaku di tingkat IR.
  - e. *Goal* (tujuan) merupakan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat. *Goal* menggambarkan tujuan pembangunan yang lebih luas dan untuk waktu yang lebih lama dari proyek tersebut. Proyek bersangkutan hanya

salah satu dari sekian banyak faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

## **Tahap 2**

### **Pengisian lajur 4: Asumsi Penting**

Asumsi penting merupakan syarat-syarat (keadaan) yang penting dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Syarat atau keadaan tersebut merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol atau berada di luar pengendalian pelaksana program, maksudnya sebagai isu-isu penting yang terkait langsung sebagai akibat dari program atau kebijakan yang dilaksanakan dan berpengaruh terhadap pencapaian hasil program. Penelitian dan penetapan asumsi dimaksudkan untuk:

- a. Menilai tingkat resiko pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sejak awal perencanaan program, Bila tingkat resiko kegagalan terlalu tinggi program mungkin dapat diubah atau target/sasaran disesuaikan kembali sehingga lebih realistis dan proporsional dengan kemampuan atau input yang ada.
- b. Mengurangi atau meminimalisasi resiko yang masih ada selama pelaksanaan program. Hal ini dimungkinkan karena faktor resiko telah diperhitungkan secara matang dan logis. Menyusun asumsi penting dapat dilakukan dengan cara berikut:
  - a. Telaah keadaan yang bukan merupakan bagian tujuan dan kegiatan pembangunan tetap memiliki keterkaitan dan dapat mempengaruhinya. Manfaatkan informasi yang tercantum dalam analisis sebelumnya.
  - b. Nilailah keadaan tersebut apakah penting untuk mencapai keberhasilan program.
  - c. Tentukan asumsi–asumsi dan cantumkan dalam kolom.
  - d. Rumuskan asumsi dalam bentuk pernyataan positif (seperti tujuan).
  - e. Gunakan semua sumber informasi yang menerangkan keadaan lingkungan program juga bermanfaat untuk mengetahui resiko yang akan dihadapi dari setiap tingkatan.

- f. Asumsi membantu dalam mengetahui resiko dan kesiapan untuk mengatasinya, bukan untuk dijadikan alasan tidak tercapainya tujuan atau menghilangkan tanggung jawab atas keberhasilan program.

## **Tahap 3**

### **Pengisian lajur 2 : Indikator Pencapaian**

Indikator pencapaian merupakan gambaran tujuan program (*goal, strategic objective, intermediate result, output, activities*). Menetapkan target yang dapat diukur untuk mengetahui tercapainya tujuan. Menjadi dasar monitoring dan evaluasi. Cara yang dapat ditempuh dalam menyusun indikator antara lain:

- a. Rumuskan indikator untuk tujuan program (*goal, strategic objectives, intermediate result, output, activities*) yang digambarkan melalui pertanyaan berikut:
- b. Sebuah indikator haruslah menggambarkan inti dari tujuan atau asumsi yang ingin diukur secara tepat.
- c. Indikator hanya mengukur satu tujuan atau asumsi saja.
- d. Mudah diterapkan berdasarkan data yang tersedia.
- e. Apabila banyak indikator yang perlu diukur, tetapkanlah satu indikator saja.
- f. Jika sumber data untuk mengukur sebuah indikator tidak ada, carilah indikator lain atau rencanakan kegiatan program untuk memperoleh data yang diperlukan, misalnya melalui survey mengenai keadaan awal sebelum adanya program.
- g. Gunakan indikator penduga (*proxy indicator*) untuk memperlihatkan suatu perubahan jangka panjang secara cepat.

## **Tahap 4**

### **Pengisian lajur 3 : Alat pengukuran dan sumber pembuktian (data)**

Metode pengukuran dan sumber data merupakan sumber pembuktian yang diperlukan untuk mengukur tingkat pencapaian target yang tercantum dalam indikator. Sumber data berupa, statistik, laporan kemajuan program, naskah atau notulen rapat, hasil survey dan penelitian serta hasil studi lapangan. Pengisian metode pengukuran dan sumber data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tetapkanlah satu indikator atau lebih (kualitatif/kuantitatif) untuk setiap aspek tujuan yang tercantum dalam kerangka kerja program.
- b. Carilah sumber data sebagai sumber pembuktian yang dapat dipercaya, tepat waktu, sesuai keperluan, mudah dan murah.
- c. Jika sulit ditemukan sumber pembuktian yang sesuai lakukan perubahan indikator.

Hasil analisis data-data tersebut selanjutnya disajikan melalui pemaparan secara naratif yang didukung dengan sajian data dan informasi berupa Tabel, gambar dan foto yang didapatkan langsung oleh penulis selama proses penelitian di lapangan serta sumber sekunder.

### 3.5.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknessses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor – faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada.

Analisis SWOT adalah analisis yang membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan (Rangkuti, 2006). Analisis ini pada prinsipnya strategi yang menghasilkan keserasian kuat antara kemampuan internal dan situasi eksternal. Analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran situasi strategis dari sebuah unit kerja ekonomi. Kekuatan unit kerja ekonomi merupakan segala sesuatu yang menjadikan unit kerja ekonomi memiliki kemampuan untuk melakukan kewajibanya dengan baik sehingga tujuan unit kerja ekonomi tercapai (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000). Menurut Rangkuti (2006) tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan strategis melalui tiga tahap analisis yaitu:

1. Tahap pengumpulan data;
2. Tahap analisis
3. Tahap pengambilan keputusan.

Tahapan pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal yang diperoleh dari lingkungan di luar organisasi dan data internal yang diperoleh di dalam organisasi. Model yang dipakai pada tahap ini yaitu matrik faktor strategi eksternal (EFAS), matrik faktor strategi internal (IFAS) dan matrik profil kompetitif. Selanjutnya untuk mengukur kondisi dari sektor unggulan diperlukan sistem pembobotan terhadap masing – masing aspek dengan cara :

1. Terlebih dahulu membuat prioritas dari yang pengaruhnya dianggap paling kuat ke yang paling lemah;
2. Menentukan persentase bobotnya dari masing-masing aspek yang antara lain:
  - a. Aspek kekuatan dan kelemahan sebagai aspek yang dilihat dari dalam (internal);
  - b. Aspek peluang dan ancaman yaitu aspek yang dilihat dari luar (eksternal)

Pembobotan diberikan nilai bobot yang sama untuk analisis SWOT keadaan awal. Analisis SWOT yang diberikan bobot didasarkan hasil wawancara dengan pihak responden. Setelah masing – masing aspek dibobot, selanjutnya diadakan penilaian dengan menggunakan hasil identifikasi SWOT. Sistem pembobotan SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pembobotan SWOT

Aspek internal dan eksternal	Nilai	Rating	Bobot	Skor tertimbang
Faktor kunci sukses	Sangat kuat, kuat, lemah, paling lemah	4 sampai 1	Persentase tersetujui	Rating x bobot
Total				Skor total

Sumber : Rangkuti (2000)

Langkah seterusnya dibentuk diagram analisis SWOT dengan cara pembobotan terhadap variabel – variabel terukur (aspek kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman) Posisi pada koordinat merupakan total skor tertimbang hasil dari :

$\Sigma$ skor tertimbang aspek kekuatan –  $\Sigma$ skor tertimbang aspek kelemahan;

$\Sigma$ skor tertimbang aspek peluang –  $\Sigma$ skor tertimbang aspek ancaman.

Strategi yang digunakan untuk matrik SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, berdasarkan hasil perhitungan dalam diagram analisis SWOT pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Matrik SWOT

IFAS EFAS	Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Peluang (Opportunities)	Strategi SO Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
Ancaman (Threats)	Strategi ST Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Atasi kelemahan mencegah ancaman

Sumber: David (2004)

David (2004), menjelaskan bahwa analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*Strategic Planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini. Hal tersebut disebut dengan analisis situasi.

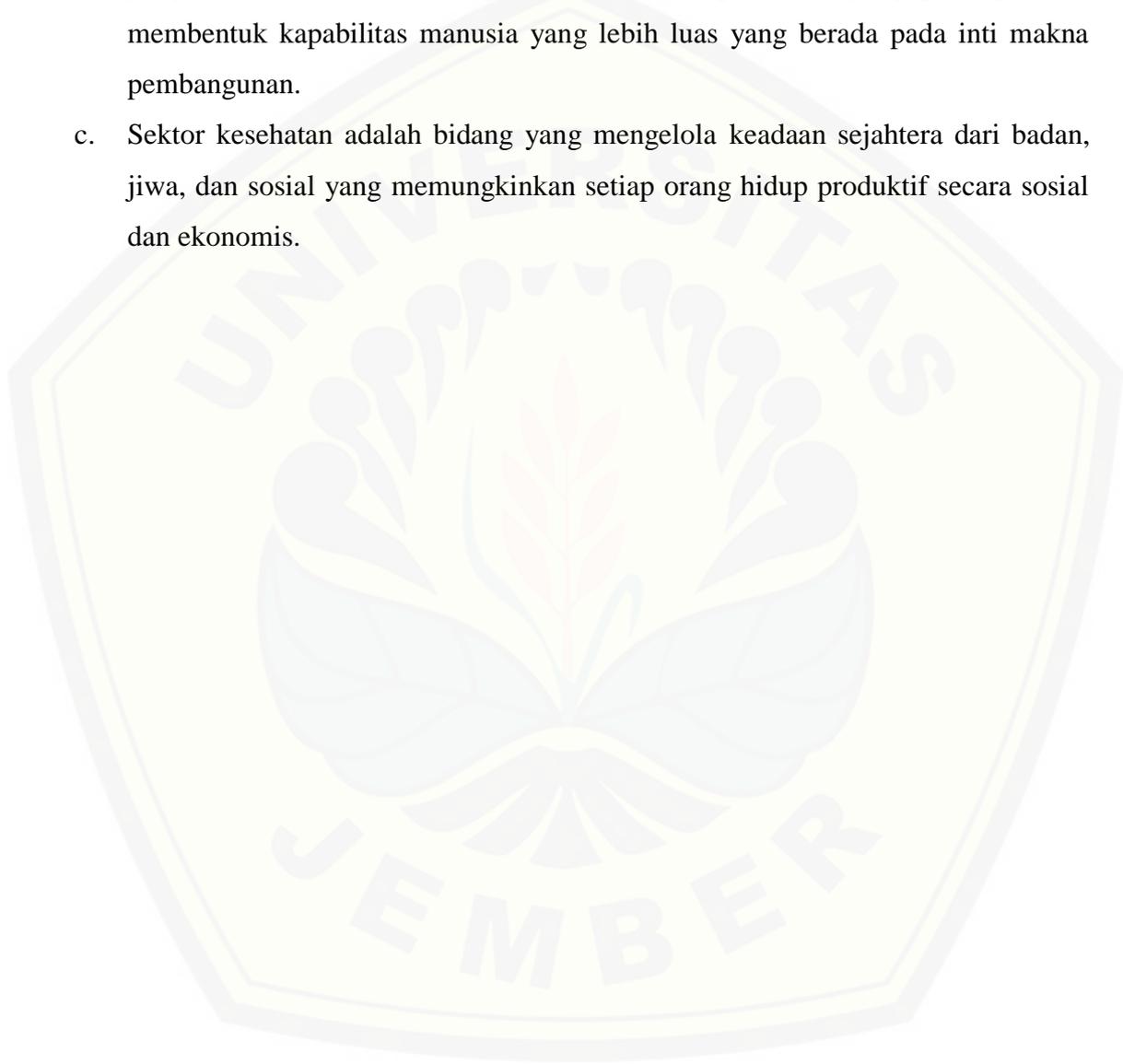
### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengeluaran pemerintah adalah belanja pemerintah di Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kabupaten Banyuwangi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal selama tahun 2012-2016 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah.

- b. Sektor pendidikan adalah sektor hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.
- c. Sektor kesehatan adalah bidang yang mengelola keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan hal - hal berikut.

- a. Kondisi Faktual (*Eksisting* Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Banyuwangi dijelaskan bahwa perubahan dalam desain logframe pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan rancangan pengeluaran pemerintah yang berdasarkan program kerja pada sektor pendidikan dan kesehatan dimana dalam penentuan pengeluaran pemerintah didasarkan pada jumlah kegiatan tetapi juga pelaksanaan program pengelolaan pengeluaran pemerintah yang didasarkan program kerja. Adanya perbedaan perencanaan matrik logframe terletak pada dasar dan pelaksana bidang kegiatan sektor pendidikan dan kesehatan.
- b. Kinerja pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan telah melebihi target yang ditetapkan. Hal itu menunjukkan adanya efisiensi kinerja pengeluaran daerah dalam upaya meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.
- c. Strategi pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan khususnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi antara lain upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu didasarkan pada penggunaan anggaran secara transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas anggaran pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pencapaian untuk sektor pendidikan, hendaknya pemerintah memperhatikan masalah yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yakni dengan menganggarkan budget yang lebih di sektor pendidikan karena merupakan sektor yang krusial untuk dapat memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia. Dalam rangka menghadapi otonomi daerah disarankan agar terus meningkatkan upaya pencapaian target pembangunan khususnya optimalisasi dibidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui bidang Pendidikan, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dapat terwujud sebagai kebijakan pemerintah yang baik dalam menciptakan Manusia yang Mandiri dan Berakhlak mulia.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap terus melakukan penguatan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, yang mengedepankan kualitas SDM khususnya sektor kesehatan sehingga kebijakan pengeluaran pemerintah difokuskan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo, Yukihiko Nishimura, Masayo Sakata, 2007. Complementarity, Fiscal Decentralization and Economic Growth, *Economics of Governance*. Heidelberg: Sep 2007. Vol. 8.
- Astri, Nikensari, dan Kuncara. 2013 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 No. 1 Maret 2013
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga: Jakarta
- Prof. Dr. Kwon, Dae-Bong (2009) *Human Capital and its measurement* The 3rdOECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy” Charting Progress, Building Visions, Improving LifeBusan, Korea 27-30 Oct. 2009
- BPS Banyuwangi, 2018. Banyuwangi Dalam Angka. Banyuwangi
- Chenery, Hollis B.; Robinson, Sherman and Syrquin, Morshe. *Industrialisation and Growth*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Chenery, Hollis B.; Robinson, Sherman and Syrquin, Morshe. *Industrialisation and Growth*. New York: Oxford University Press, 1997
- Churchill Sefa Awaworyi, Siew Ling Yew dan Mehmet Ugur. 2015. *Effects of Government Education and Health Expenditures on Economic Growth: A Meta-Analysis* SSRN Electronic Journal. Vol.4 No.1
- Craigwell, Roland, *et al.* 2012. The Effectiveness of Government Expenditure on Education and Health Care in the Carribean. *International Journal of Development Issues*, 11(1) : 4-18
- David, Fred. R.2004. *Manajemen Strategis:Konsep-Konsep*. Jakarta: PT.Indeks
- Delavallade, Clara. 2006. *Corruption And Distribution Of Public Spending In Developing Countries*. *Journal Of Economics And Finance*. Vol.30No.2: 222-239
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Erlangga
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Eddy, K. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI.

- Faisol, K. Yolanda dan Pateda. 2017. *Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Volume.2. No.1
- Faisol, Mukarrom, 2017. *Ekonomi Mineral Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Fitzenz, J. 2000. *The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance*. Second Edition. New York: Amacom.
- García, Ana Ortuno dan Sanchez, Praxedes Munoz. 2017. *Analysis Of The Vicious Circle Of Poverty And Social Exclusion Of The Gypsy Woman In The Neighbourhood Of Los Rosales. Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Volume 237, 21 February, Pages 618-625
- Guritno, 1999. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, C. (2013). *Analisis Model Pengukuran Human Capital dalam Organisasi*. Binus Bussiness Review
- Houghton, E. 2017. *Human Capital Analytics and Reporting: Exploring Theory And Evidence*. London: Chartered Institute of Personnel and Development.
- Jhingan M.L, 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kahang, Merang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Volume 3 No.1. Hal,1
- Korankye, Addae. A. 2018. *Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature*. American International Journal of Social Science, Vol. 3, No. 7. December 2014
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga : Jakarta.
- Limanli, Omer. 2015. *Intertemporal poverty in Turkey. Procedia Economics and Finance Volume 30, 2015, Pages 487-497*
- LKPJ Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2018

- Mangkoesebroto, Guritno, 1994, *Kebijakan Publik Indonesia. Substansi dan Urgensi*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Mankiw, N. G. 2006. Teori Makro Ekonomi Edisi Ke enam. Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- Munir, Badrul, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda. Provinsi. Nusa Tenggara Barat
- Muslim, 2003 *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI*. Tesis. Palembang. Pasca Sarjana UNSRI
- Nartguin, Senay Sezgin dan–Gültekin Gözde Sezen.2017. Examination of 2015 Human Development Index in Terms of Education: Comparison of the Continents and Turkey. *Journal of Education and Practice*. Vol.8, No.3. www.iiste.org
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
- Nurikhsan, Diky, 2007. Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Kota Cimahi Periode 2003-2005. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Nursyawalina. 2010. Analisis Pengeluaran Pemerintah terhadap Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Lahat dan Muaraenim. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Peleah, Mihail dan Ivanov, Andrey.2017. Sustainable Human Development Index— A Pragmatic Proposal For Monitoring Sustainability Within The Affordable Limits. *Measurement of Economic Well-Being*, Seoul, Korea, April 26-28
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pada Pasal 1 butir 5 tentang “*Pengelolaan Keuangan Daerah*”. Jakarta
- PP No. 58 Tahun 2005. pada Pasal 1 butir 6 tentang “*Pengelolaan Keuangan Daerah*”. Jakarta
- Rahmawati, Y. 2017. Human Capital Terhadap Efisiensi Perusahaan Perbankan di Indonesia. Sains dan Seni
- Rangkuti, Freddy. 2000, Teknik Membuat Perancangan Bisnis dan. Analisis Kasus, Jakarta, PT Gramedia Pustaka
- Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia

- Ronald Immanuel Ottay<sup>1</sup>, Oksfriani Jufri Sumampouw<sup>2,3</sup>, Jeini Esther Nelwan<sup>2,3</sup>, Herman Cahyo Diartho Cahyo<sup>4</sup>. (2015) *Coastal Area Public Health Problem (A Case Study in the City of Manado North Sulawesi Indonesia)*
- Salehudin, I. 2015. *Invest in Yourself: Aplikasi Konsep Human Capital dari Sudut Pandang Karyawan*. Manajemen Usahawan Indonesia
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhanus. 2001. *Makro Ekonomi*. Jakarta.
- Solihin, Ahmad et al. 2017. Efficiency and effectiveness of Government expenditure on Education at Districts/ Cities Level in East Java Indonesia. *Asian Social Science* Vol 13 No 8
- Stockley. 2003. *Poverty: Its Causes and Solutions*. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 7, No. 8,
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta Press. Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Edisi kelima. Yogyakarta: BPF- Yogyakarta
- Todaro Michael P, 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.
- Todaro Michael P, 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia*. Ketiga, Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael,P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia*. Ketiga, Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Todaro Michael P, 2011. *Pembangunan Ekonomi Dunia*. Ketiga, Edisi 7. Jakarta: Erlangga
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2003. “*Keuangan Negara dan Belanja Negara*”. Jakarta: Republik Indonesia
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004. “*Pemerintah Daerah*”. Jakarta: Republik Indonesia

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 66 ayat 24, “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*”. Jakarta: Republik Indonesia

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 “*Pemerintah Daerah*”. Jakarta.

UNDP, 1995.*Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press

UNDP, 2011. *Human Development Report 2011*. Oxford University Press. New York

UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. Oxford University Press. New York

UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Wahyuni, I.G, Made S. Yuliarmi, 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Yasa, Mahendra, 2014. *Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Kalungkung*. Fakultas Ekonomi : Universitas Udayana.